

**ANALISIS INDIKATOR
KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
TAHUN 2005**

*INDICATOR ANALYSIS
OF HUMAN RESOURCE QUALITY
IN SOUTH SULAWESI AND WEST SULAWESI PROVINCES
IN 2005*

MARTIN WIBISONO



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**ANALISIS INDIKATOR
KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
TAHUN 2005**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Disusun dan diajukan oleh

MARTIN WIBISONO

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

T E S I S

**ANALISIS INDIKATOR
KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
TAHUN 2005**

Disusun dan diajukan oleh

MARTIN WIBISONO

Nomor Pokok : P03 06 204 507

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 9 Mei 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat

Prof. Dr. Sulaiman Asang, MA
Ketua

Dr. H. Madris, DPS, M.Si
Anggota

Ketua Program Studi
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Hasanuddin

Dr. Ir. Didi Rukmana, M.Sc

Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTIN WIBISONO

Nomor Pokok : P03 06 204 507

Program Studi : Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)
Konsentrasi Studi Perencanaan Kependudukan
dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Judul Tesis : Analisis Indikator Kualitas Sumberdaya Manusia
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Barat Tahun 2005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang tersebut diatas adalah betul-betul disusun oleh penulis sendiri tanpa disadur/dijiplak dari tesis yang ada.

Demikian pernyataan ini, penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 9 Mei 2007
Yang Menyatakan

MARTIN WIBISONO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, yang karena bantuan berbagai pihak, tesis ini selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Sulaiman Asang, MA dan Dr. Madris, DPS, M.Si. sebagai komisi penasihat yang telah bersedia menjadi pembimbing dari penyusunan proposal penelitian sampai pada tahap penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat : Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi, SU., Dr. Paulus Uppun, MA., Drs. Hasbi, M.Si., Drs. Johny Anwar Zs, Drs. Syihabuddin dan Ahmad Nasir, S.ST. atas dukungan moril dan berbagai saran dalam penyusunan tesis ini, juga kepada kedua orang tua, istri tercinta-Nurmiati dan ketiga buah hati kami 'Afifatus Salma, Amani Zulfaizah dan 'Azzamul Hanif atas do'anya.

Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Praise The Lord.

Makassar, 9 Mei 2007

Penulis,

ABSTRAK

MARTIN WIBISONO, *Analisis Indikator Kualitas Sumberdaya Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Tahun 2005* (dibimbing oleh Sulaiman Asang dan Madris)

Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi kualitas sumber daya manusia ditinjau dari indikator kesejahteraan rakyat hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2005 yang menggambarkan keterkaitannya dengan kualitas sumber daya manusia.

Penelitian menggunakan sampel sebanyak 14.688 rumah tangga di 23 kabupaten/kota Sulawesi Selatan dan menggunakan sampel sebanyak 3.136 rumah tangga yang tersebar di 5 kabupaten di Sulawesi Barat secara acak proporsional. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kualitas sumber daya manusia berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat tahun 2005 di Provinsi Sulawesi Barat lebih rendah daripada Provinsi Sulawesi Selatan.

ABSTRACT

MARTIN WIBISONO, *Indicator Analysis of Human Resource Quality In South Sulawesi and West Sulawesi Provinces in 2005*. (Supervised by Sulaiman Asang and Madris).

The objectives of the study is to investigate the human resources quality viewed from welfare indicator as described in The 2005 Social Economic National Survey.

The sample research consisted 14.688 households spread in 23 regencies/municipality in South Sulawesi and 3.136 households in five regencies of West Sulawesi Province. The sample is randomized proportionally determined and the data collected through observation, questionnaire and interviews. They are then analyzed descriptively.

The study proves that the human resource quality value of West Sulawesi Province based on the welfare indicator of 2005 is lower than that of South Sulawesi.

DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR	v	
ABSTRAK	vi	
ABSTRACT	vii	
DAFTAR ISI	viii	
DAFTAR TABEL	X	
DAFTAR GAMBAR	Xii	
DAFTAR LAMPIRAN	Xiii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Kegunaan Penelitian	8
	E. Batasan Penelitian	8
	F. Sistematika Penulisan	10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	11
	A. Pengertian Analisis Kualitas SDM	11
	B. Kualitas SDM yang Handal	12
	C. Indikator Kualitas SDM	13
	D. Kerangka Konseptual	20

BAB III	METODE PENELITIAN	22
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	22
	B. Lokasi Penelitian	23
	C. Sumber Data	23
	D. Teknik Pengumpulan Data	24
	E. Analisis Data	24
	F. Definisi Operasional	25
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
	A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	28
	1. Kondisi Geografis	28
	2. Kondisi Ekonomi	29
	3. Kondisi Demografi	31
	B. Kondisi Sumberdaya Manusia	37
	C. Kualitas Sumberdaya Manusia	68
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN		79

DAFTAR TABEL

Nomor		halaman
1.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2001 - 2005	33
2.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005	36
3.	Rasio Ketergantungan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005	38
4.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2005	43
5.	Angka Lahir Hidup di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2005	47
6.	Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2005	49
7.	Persentase Balita dengan Imunisasi Lengkap di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2005	52
8.	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2005	56

9.	Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SLTP ke atas di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2005	58
10.	Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2005	60
11.	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Air Bersih di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2005	63
12.	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Jamban Sendiri di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2005	65
13.	Persentase Rumah Tangga dengan Jarak Sumber Air ke Penampungan Akhir lebih dari 10 meter di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2005	67
14.	Persentase Indikator Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2005	70
15.	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja di luar Sektor Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2005	79
16.	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Minimal SLTP di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2005	80

DAFTAR GAMBAR

Nomor	halaman
1. Diagram Kerangka Analisis	21

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja di luar Sektor Pertanian	79
2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah pilar utama seluruh aspek kehidupan, kemajuan atau keterpurukan berbagai aspek kehidupan sangat ditentukan oleh manusia itu sendiri. Kemajuan dan kemakmuran suatu individu, kelompok, bahkan bangsa dan negara tidak akan pernah ditentukan oleh seberapa besar "Sumberdaya Alam" yang dikuasainya, melainkan sangat ditentukan oleh tingkat kualitas "Sumberdaya Manusia" yang dimilikinya. Dengan jumlah manusia yang tidak banyak, namun mempunyai kualitas di atas rata-rata manusia biasa, suatu wilayah bisa lebih unggul dari wilayah lainnya.

Tujuan utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia adalah fokus utama pelaksanaan pembangunan serta menjadi sasaran pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat (Roestam, 1993). Kualitas yang dimaksud bukan saja manusia yang terpenuhi kesejahteraan lahiriah dan materialnya, tetapi juga manusia yang cerdas. Oleh sebab itu, pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) yang diselenggarakan hendaknya dilakukan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu dalam berbagai bidang kehidupan.

Prioritas pembangunan nasional diletakkan pada bidang ekonomi seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terlebih dalam menghadapi era globalisasi, khususnya perdagangan bebas di kawasan ASEAN 2003 dan di kawasan Asia-Pasifik 2020, yang diwarnai dengan persaingan yang ketat dan menentukan jati diri suatu bangsa di antara bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadi persaingan antar negara. Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal.

Sumberdaya manusia merupakan faktor yang paling krusial dalam membangun suatu wilayah. Dengan jumlah manusia yang tidak banyak, namun mempunyai kualitas di atas rata-rata manusia biasa, suatu wilayah bisa lebih unggul dari wilayah lainnya. Untuk melihat sejauh mana kualitas

manusia yang ada di suatu daerah, dapat menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks ini dibentuk oleh 3 faktor, yaitu kesehatan (1 indikator), pendidikan (2 indikator), dan daya beli/kemampuan ekonomi (1 indikator).

Bila ditilik dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Barat, baru mencapai 65,7 pada tahun 2005. Dengan nilai tersebut Sulawesi Barat menempati peringkat ke-29 (dari 33 provinsi) setelah Kalimantan Barat. Jadi, ada 4 provinsi lagi yang kualitas sumberdaya manusianya lebih rendah (menurut IPM) dari Sulawesi Barat, yaitu Irian Jaya Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Sementara provinsi induk, Sulawesi Selatan menempati urutan 23 (dengan nilai IPM 68,1). Dibanding dengan provinsi yang ada di Sulawesi, provinsi termuda ini mempunyai kualitas sumberdaya manusia yang paling rendah.

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia Sulawesi Barat ini disebabkan karena rendahnya 3 faktor tersebut di atas. Di bidang kesehatan, yang dicerminkan oleh angka harapan hidup, sumberdaya manusia negeri ini diperkirakan mampu mencapai usia 66,4 tahun (sedikit lebih rendah dari angka harapan hidup Sulawesi Selatan, 68,7 tahun), sedangkan yang paling tinggi di Sulawesi adalah Sulawesi Utara 71,7 tahun. Rendahnya angka harapan hidup di Sulawesi Barat ini, dipengaruhi oleh pelbagai factor seperti kesehatan sang ibu, kesehatan bayi, ketersediaan fasilitas dan petugas

kesehatan. Di Sulawesi Barat, penolong sebagian besar ibu melahirkan adalah dukun (68,8 %), hanya sebagian kecil (29,4 %) yang ditolong oleh dokter/bidan. Ini merupakan penyebab paling krusial dalam menjaga kelangsungan hidup bayi menjadi lebih langgeng atau hanya sesaat. Selain itu, sanitasi lingkungan di wilayah ini juga relatif rendah, mengingat masih banyaknya rumahtangga yang menggunakan sumur dan mata air yang tak terlindung (31,4 %) dan air sungai (7,6 %) untuk sumber air minum.

Dari sisi pendidikan, Sulawesi Barat mempunyai angka melek huruf 83,4 %. Ini berarti masih ada 16,6 % lagi penduduk yang tidak bisa baca tulis. Dibanding dengan propinsi yang ada di tanah Sulawesi, Provinsi Sulawesi Barat adalah yang terendah, sedangkan yang tertinggi adalah Sulawesi Utara, 99,3 %, sementara propinsi induk (Sulawesi Selatan) sedikit di atas, 84,6 %. Indikator pelengkap di bidang pendidikan adalah lamanya bersekolah. Indikator ini berguna untuk memperlihatkan jangkauan pendidikan yang mampu diraih oleh penduduk di suatu wilayah. Semakin panjang/lama mengikuti pendidikan, semakin baik. Untuk Sulawesi Barat indikator ini menunjukkan 6 tahun, artinya penduduk Sulawesi Barat secara rata rata hanya menjangkau pendidikan sampai sekolah dasar. Diantara propinsi sepulau, lamanya pendidikan penduduk propinsi ini adalah yang terendah, sedangkan yang tertinggi adalah Sulawesi Utara, 8,8 tahun (hampir tamat SLTP), sementara Sulawesi Selatan 7 tahun (hingga kelas 1 SLTP).

Rendahnya rata rata lama bersekolah penduduk Sulawesi Barat ini, juga diperkuat oleh kenyataan bahwa proporsi penduduk 10 tahun ke atas yang paling tinggi tamat SD sekitar 74 %.

Faktor yang terakhir yang menentukan nilai IPM adalah daya beli atau daya kemampuan ekonomi penduduk, yang dalam hal ini dicerminkan oleh rata rata pengeluaran per kapita riil. Untuk factor yang satu ini Sulawesi Barat punya nilai yang relatif tinggi, Rp. 616.600,- per kapita. Lebih tinggi sedikit dari Sulawesi Utara yang Rp. 616.100,- per kapita, namun lebih rendah sedikit dari Sulawesi Selatan (Rp. 616.800,-). Tingginya tingkat pengeluaran per kapita di Sulawesi Barat, mungkin lebih disebabkan harga barang yang relative tinggi, bukan karena kuantitas barang yang dikonsumsi. Ini agak berbeda dengan Sulawesi Selatan, karena harga barang di Sulawesi Selatan secara rata rata lebih rendah dari Sulawesi Barat.

Dari gambaran di atas sudah bisa disimak hal apa saja yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya seperti penyiapan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, sanitasi lingkungan, mendorong masyarakat agar berperilaku sehat dan mau menyekolahkan anak ke jenjang lebih tinggi¹. Namun dalam tulisan ini ingin dilihat lebih jauh tentang pembentukan kualitas SDM dari sudut pandang pembangunan kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan.

¹ Anwar Zs., Johny, 2006, *Tantangan Pimpinan Daerah dan Masyarakat Sulawesi Barat ke Depan*, Radar Sulbar.

B. Perumusan Masalah

Gambaran latar belakang di atas pada dasarnya ditujukan untuk menggambarkan lebih jauh tentang kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dilihat dari pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat menjadi hal yang sangat penting sebagai upaya terciptanya kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang handal.

Pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dikatakan berhasil apabila suatu daerah dapat menghasilkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas dan siap pakai dalam menghadapi tantangan masa depan. Maka dirumuskanlah permasalahan mengenai kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005, untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana nilai kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat dalam pembentukan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2005 ?
2. Bagaimana keterbandingan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2005 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kualitas sumberdaya manusia secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan serta keunggulan daya saing antara Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi induk dan Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi hasil pemekaran, dukungan sumberdaya manusia yang handal dibutuhkan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat di kedua provinsi tersebut, maka sangat perlu untuk mengetahui kondisi kualitas SDM yang akan mendukung pembangunan nasional maupun daerah dengan menggunakan data indikator kesejahteraan rakyat dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2005 di kedua provinsi tersebut.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui nilai kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat dalam pembentukan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005.
2. Mengetahui keterbandingan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2005.

D. Kegunaan Penelitian

Kebijakan Pembangunan Nasional dan Otonomi Daerah telah membawa perubahan strategik pada kualitas SDM yang diperlukan setiap daerah untuk dapat bersaing secara positif dengan daerah lain di Indonesia. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mewujudkan kualitas SDM yang handal, namun demikian peningkatan kualitas SDM merupakan tanggung jawab semua pihak.

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Menjadi informasi awal berkenaan dengan indikator kesejahteraan rakyat yang mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
2. Menjadi bahan kajian ilmiah untuk kegiatan perencanaan pembangunan sosial dalam rangka pencapaian pemerataan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di era globalisasi.

E. Batasan Penelitian

Dalam penulisan ini permasalahan kualitas SDM yang dibahas dibatasi untuk Provinsi Sulawesi Selatan (terdiri dari 23 kabupaten/kota sebagai provinsi induk) dan Provinsi Sulawesi Barat (terdiri dari 5 kabupaten

sebagai provinsi pemekaran) pada tahun 2005. Analisis deskriptif yang dilakukan terbatas dengan menggunakan indikator kesejahteraan rakyat tahun 2005 yang dapat menggambarkan keterkaitannya dengan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) adalah : indikator pendidikan (3 indikator), indikator kesehatan (3 indikator), indikator lingkungan (3 indikator), serta indikator tenaga kerja (2 indikator). Adapun kesebelas indikator tersebut secara berurutan adalah:

- a. Angka partisipasi kasar SLTP.
- b. Persentase penduduk yang berpendidikan SLTP ke atas.
- c. Angka Melek Huruf.
- d. Angka lahir hidup.
- e. Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan.
- f. Persentase balita yang diimunisasi secara lengkap.
- g. Persentase rumah tangga dengan fasilitas air bersih.
- h. Persentase rumah tangga yang mempunyai wc sendiri.
- i. Persentase rumah tangga dengan jarak penampungan akhir >10m.
- j. Rasio Ketidaktergantungan.
- k. Persentase tenaga kerja di luar sektor pertanian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibabagi dalam lima bab sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang deskripsi teoritis variabel, kerangka berpikir.
- Bab III Metodologi Penelitian, yang berisi tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, variabel, serta teknik analisis data, dan definisi operasional.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan deskripsi data, persyaratan analisis data, pengujian hipotesis, serta pembahasan.
- Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis Kualitas Sumberdaya Manusia

Dilihat dari sudut pandang etimologi "Analisis Kualitas Sumberdaya Manusia" terdiri dari 3 kata dari masing-masing kata mempunyai makna tersendiri. Hal ini perlu dijelaskan, di samping untuk memberi arahan pengertian yang seragam, sekaligus untuk dapat memberi batasan-batasan dan kejelasan ke arah mana fokus uraian selanjutnya, juga untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran, oleh karena itu ketiga kata tersebut dijelaskan satu demi satu di bawah ini:

- a) Analisis, berasal dari kata *analyse* dalam bahasa Inggris artinya mengupas, menguraikan, mengulas dan membahas. Menurut kamus Bahasa Indonesia analisis adalah penelitian sesuatu masalah.
- b) Kualitas, menurut Simamora dalam Moviyanti (2003) kualitas bermakna "mutu atau kecakapan", kualitas itu selalu mengacu kepada hasil karya dan perbuatan manusia. Kualitas adalah menunjukkan suatu kondisi yang dibandingkan dengan suatu ukuran tertentu berdasarkan norma-norma atau nilai-nilai mengenai sesuatu.

- c) Sumberdaya Manusia, adalah daya yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia itu berupa tenaga atau kekuatan (energi atau power) yang mempunyai ciri seperti :
- a. Ciri-ciri pribadi berupa pengetahuan, perasaan dan keterampilan.
 - b. Ciri-ciri interpersonal yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungannya.
 - c. Sukarno (2002) menyatakan bahwa sumberdaya manusia adalah bagian dari manusia yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumberdaya dalam pembangunan.
 - d. Menurut Loeb dalam Moviyanti (2003) sumberdaya manusia adalah modal paling berharga bagi suatu bangsa. Kebangkitan dan keruntuhan suatu negara akan sangat tergantung dari kemampuan mereka memanfaatkan kepandaian otak (*brain power*) yang dimiliki untuk menangkap gagasan baru dan bersaing di pasar global sebagai produsen terbaik atau termurah di dunia.

B. Kualitas Sumberdaya Manusia yang Handal

Kualitas sumberdaya manusia yang handal ialah yang menguasai ilmu, teknologi, informasi, mempunyai komitmen terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lain, serta mempunyai hubungan fungsional dengan sistem sosial dan biogeofisik (lingkungan) dalam ekosistem

sosiogeofisik (sosial) yang sangat dipersyaratkan dalam pembangunan berkelanjutan (Djaafar, 2001).

Menurut Panjaitan, (1994) melalui sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dapat terbentuk sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Memiliki kemampuan mental (intelegensia) dan keterampilan fisik individual.
- b) Memiliki kemampuan psikologis dalam bentuk daya persepsi, sikap, kepribadian, motivasi.
- c) Memiliki kemampuan organisasi sebagai sumberdaya, kepemimpinan, kerjasama, koordinasi.

Suhardiman dalam Moviyanti (2003), merumuskan hal-hal di atas sebagai kemampuan untuk memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemampuan manajemen.

C. Indikator Kualitas Sumberdaya Manusia

GBHN 1999 menyebutkan pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas penduduk. Sehingga penempatan SDM tidak hanya dipandang sebagai modal pembangunan, tapi juga

dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan (Najib dalam Moviyanti, 2003).

Indikator kesejahteraan rakyat menjadi alat penting dalam mengevaluasi berbagai kebijakan maupun program yang sedang/telah berjalan, sebagai upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera (BPS, 1999).

Model pembangunan Harrod-Domar menganggap bahwa kesejahteraan sebagai bagian dari investasi yang terdiri dari pendidikan, kesehatan dan perumahan (Esmara, 1987: 578).

Menurut Muljana dalam Moviyanti (2003) menyatakan bahwa keadaan sumberdaya manusia (SDM) di suatu negara mungkin merupakan faktor yang paling menentukan. Dimana yang dimaksud dengan kualitas sumberdaya manusia (SDM) ialah kualitas atau mutu penduduk negara yang bersangkutan. Secara menyeluruh mutu penduduk atau mutu manusia mencakup kecerdasannya, hasratnya untuk maju, kegairahannya untuk bekerja sekuat tenaga, kesediaannya untuk mengambil risiko dalam usaha, kemampuannya untuk bekerja sarna, kemauannya untuk menabung, kejujurannya dan rasa tanggungjawabnya.

BAPPENAS dalam BPS (1999) mengamanatkan aspek yang hendak dicapai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kesehatan, tempat tinggal, akses ke air bersih, pendidikan, dan keadaan lingkungan.

Ananta dan Hatmaji (1985) mengungkapkan beberapa indikator yang berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia (SDM) antara lain: indikator pendidikan, indikator kesehatan, dan indikator lingkungan. Ray dalam Moviyanti (2003) mengemukakan paling tidak faktor utama yang mempengaruhi pengembangan sumberdaya manusia (SDM) ialah pembangunan pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha yang amat sering dihubungkan dengan investasi dalam modal manusia, karena investasi pada hakikatnya adalah pengorbanan di masa kini untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Di samping itu, pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumberdayanya (BPS, 1999). Investasi mutu modal manusia dilakukan melalui investasi di bidang pendidikan dengan berpartisipasi sekolah maka akan dapat meningkatkan mutu penduduk suatu negara dan penyediaan sarana serta prasarana di sektor kesehatan (Tjiptoherijanto, 1989).

Keberhasilan pembangunan dapat ditunjang dengan memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. BAPPENAS (1993:9), dalam dokumennya mencatat bahwa: "Pengembangan manusia dalam jangka pendek berarti menyelenggarakan pendidikan dan latihan untuk memenuhi keterampilan teknis, managerial dan administrasi yang ditujukan kepada

kelompok target tertentu dengan cara rnengikutsertakan partisipasi mereka dalam sistem sosial ekonomi daerahnya, kelompok target tersebut meliputi wanita, penduduk miskin di desa dan kota yang tak mempunyai tanah, pemuda, masyarakat terisolir yang dalam arti luas pengembangan sumberdaya manusia (SDM) mencakup pengembangan dalam aspek pengetahuan faktual (kognitif) dan non-kognitif dari pendidikan sekaligus perbaikan status kesehatan." (Elfindri, 2001)

Sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pasay dalam Syarif (1993) mengemukakan bahwa salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sumberdaya manusia (SDM) adalah tingkat pendidikan. Pendapat serupa dikemukakan oleh Lains (1987) yang mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan komponen penentu kualitas penduduk.

Teori investasi sumberdaya manusia (SDM) pada dasarnya mempercayai bahwa penghasilan seumur hidup dari mereka yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih besar daripada penghasilan seumur hidup mereka yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, kendati biaya tidak langsung dan biaya langsung dari pendidikan yang juga lebih tinggi sudah ikut diperhitungkan. Dengan kata lain investasi dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia (SDM) itu menguntungkan. Keuntungannya tidak hanya dipetik oleh orang

yang mendapatkan pendidikan itu sendiri (*private rate of return*) melainkan juga dipetik oleh masyarakat luas (*social rate of return*) (Simanjuntak, 1985).

Masalah pendidikan penduduk menurut Tjiptoherijanto (1989) juga berperan dalam bidang kesehatan karena pada umumnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi pola pikir mereka. Jika tingkat pendidikan rendah maka pola pikir mereka akan sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum paham akan arti kesehatan.

Menyadari betapa besar dan penting peran pendidikan dalam peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia (SDM), pemerintah mengambil langkah dengan mencanangkan program Wajib Belajar 9 tahun yang pada dasarnya merupakan prasyarat umum bahwa setiap anak usia Sekolah Dasar (7 s/d 12 tahun) harus dapat membaca, menulis dan berhitung. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara, maka Pemerintah menetapkan program Wajib Belajar 9 tahun dengan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1994 tentang pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun yang diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemilikan kompetensi pendidikan dasar (Wahjoetomo, 1993).

Sasmito (2001) dalam penelitiannya menyimpulkan peubah yang dapat mencerminkan indikator pendidikan di antaranya adalah: Angka

Partisipasi Kasar (APK) SLTP dan persentase penduduk yang berpendidikan minimal SLTP.

Menelaah ungkapan di atas jelaslah bahwa SDM sebagai tenaga kerja sangat diperlukan keterampilannya dalam melaksanakan tugas peningkatan kualitas bangsa dan menunjang pertumbuhan ekonominya.

Evaluasi dan perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta produktivitas tenaga kerja, sehingga tidak mengherankan jika analisis mengenai kualitas sumberdaya manusia (SDM) biasanya menempatkan faktor ketenagakerjaan sebagai salah satu dimensi yang vital (BPS,1999). Lebih lanjut Munandar (1981) mengatakan bahwa salah satu konsekuensi dalam penggunaan pendekatan sumberdaya manusia (SDM) dalam proses pembangunan nasional ialah pengembangan ketenagakerjaan. Potensi dan kemampuan tenaga kerja perlu dikembangkan terus menerus, sehingga pemanfaatannya dapat semakin meningkat. Sasmito (2001) merumuskan bahwa variabel-variabel yang digunakan untuk mencerminkan ketenagakerjaan antara lain adalah rasio ketergantungan dan persentase tenaga kerja di luar sektor pertanian. Dari rasio ketergantungan maka dapat diketahui rasio ketidakgantungan.

Menurut Riyadi dalam Moviyanti (2003), lingkungan ialah tempat pemukiman dengan segala sesuatunya, di mana organisme itu hidup beserta

segala keadaan dan kondisinya, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diduga ikut mempengaruhi tingkat kehidupan maupun kesehatan dari organisme itu. Putranto dalam Moviyanti (2003) berpendapat kesejahteraan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang bersih akan mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Djajadiningrat dalam Moviyanti (2003) mengatakan kesehatan penduduk sangat bergantung pada sejumlah kondisi lingkungan seperti air bersih yang memadai, sanitasi, dan perumahan.

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping sandang pangan. Oleh sebab itu, kondisi perumahan dapat juga dijadikan sebagai indikator lingkungan maupun indikator kesejahteraan rakyat, antara lain yaitu penggunaan fasilitas tempat buang air besar dan jaraknya dari tempat penampungan tinja, dan sebagainya (BPS, 1995). Terkait hal tersebut maka peubah lain yang mencerminkan indikator lingkungan oleh Sasmito (2001) dalam penelitiannya menyebutkan antara lain: rumah tangga yang mempunyai fasilitas air bersih, dan rumah tangga yang mempunyai *water closed* sendiri dengan tempat pembuangan yang permanen (septictank).

Hasbullah dalam Moviyanti (2003) mengatakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia (SDM) adalah tingkat kesehatan. Dalam sistem kesehatan nasional disebutkan bahwa

tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional (Tjiptoherijanto, 1989). Lebih lanjut Tjiptoherijanto mengungkapkan derajat kesehatan yang baik memungkinkan orang menerima pendidikan yang baik demikian pula sebaliknya, dengan demikian pengelolaan kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki. Menurut Agung dalam Fajri (2000) bahwa variabel yang dapat mencerminkan indikator kesehatan di antaranya jumlah anak yang dilahirkan hidup. Hal ini senada dengan Julian Simon yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap pembangunan. Semakin besar jumlah penduduk suatu negara, semakin besar kemungkinan untuk mempunyai penduduk yang genius.

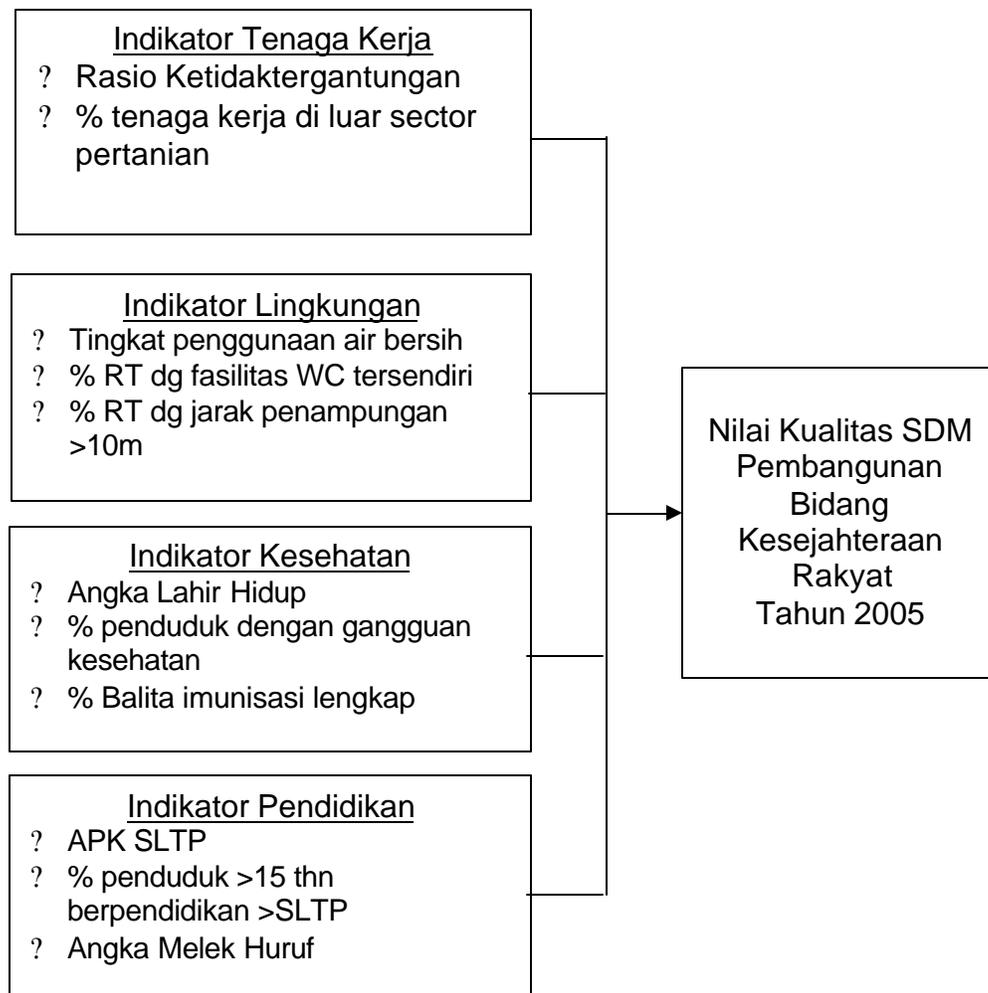
D. Kerangka Konseptual

Kualitas SDM dalam penulisan ini dengan melihat dari 4 indikator kesejahteraan rakyat yaitu tenaga kerja, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan, merupakan faktor pembentuk terhadap pengembangan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dengan menggunakan variabel-variabel dari masing-masing indikator. Penempatan SDM tidak hanya dipandang sebagai modal pembangunan akan tetapi di jadikan juga sebagai tolok ukur

keberhasilan pembangunan. Mengingat tujuan utama dari pembangunan nasional di bidang kesejahteraan rakyat adalah meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakatnya. Apabila terjadi peningkatan kualitas SDM maka akan berpengaruh positif terhadap pembangunan.

Berdasarkan permasalahan umum yang ada maka penulis merumuskan pemecahan masalah dalam bentuk bagan yang menyatakan pola hubungan antar variabel yang diteliti sebagai berikut :

Gambar 1. Diagram Kerangka Analisis



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel (karakteristik) yang diperoleh dari data sekunder. Adapun data yang dirancang untuk dilakukan penelitian adalah pertanyaan pada kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2005. Dimana metode penelitiannya adalah metode survei dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2005 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data statistik yang digunakan dari SUSENAS 2005 merupakan indikator berupa besaran/nilai yang menggambarkan/mendeteksi kecenderungan suatu fenomena/keadaan, atau mengidentifikasi hubungan antara berbagai elemen yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang disusun dari hasil pengumpulan data SUSENAS KOR.

Keragaman data yang di kumpulkan dan di rancang sesuai dengan program-program pembangunan yang berkaitan satu dengan lainnya. Pengumpulan datanya yang di lakukan setiap tahun dapat memberikan gambaran kemajuan suatu program pembangunan secara berkesinambungan. Cakupannya juga sudah mampu memberikan estimasi hingga pada tingkat kabupaten/kota.

B. Lokasi Penelitian

Survei Sosial Ekonomi Nasional yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, namun demikian dalam tulisan ini batasan permasalahan hanya meneliti kedua provinsi tersebut, sehingga di luar kedua provinsi tersebut tidak diperhitungkan dalam tulisan ini, sedangkan waktu pelaksanaan survei pada bulan Juni-Juli 2005.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mentah (raw data) sebagai data sekunder hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2005 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Alasan digunakannya data SUSENAS karena merupakan sumber data yang mampu menghasilkan banyak ragam data, selain itu datanya juga menyediakan keterbandingan antar wilayah dalam hal ini Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan, serta pertanggungjawaban ilmiahnya dijamin oleh Badan Pusat Statistik selaku penyedia data yang digunakan dalam penelitian ini.

Secara umum, SUSENAS bertujuan untuk mendapatkan ketersediaan data pokok tentang kesejahteraan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan dan dibutuhkan untuk memonitor pembangunan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dengan mengolah data mentah hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2005 dengan menggunakan sampel sebanyak 14.688 rumah tangga yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan menggunakan sampel sebanyak 3.136 rumah tangga yang tersebar di 5 kabupaten di Sulawesi Barat.

E. Analisis Data

Analisis deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu hal secara umum dan bertujuan untuk mempermudah penafsiran atau penjelasan, di antaranya melalui analisis tabel. Analisis deskriptif dengan metode tabulasi adalah metode analisis yang paling sederhana tetapi memiliki kemampuan menerangkan yang cukup kuat untuk menjelaskan indikator-indikator kualitas sumberdaya manusia.

Analisis deskriptif dengan menyajikan tabulasi distribusi persentase dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan gambaran atau informasi tentang perbedaan karakteristik indikator yang mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia pada setiap kabupaten/kota beserta keterbandingannya antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat tahun 2005.

F. Definisi Operasional

Konsep dan definisi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a Angka partisipasi kasar SLTP (APK SLTP)
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) merupakan jumlah siswa yang duduk di bangku SLTP (masih sekolah pada tingkat SLTP) dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 13 sampai 15 tahun.
- b Persentase penduduk yang berpendidikan SLTP ke atas (MIN SLTP)
Tingkat Pendidikan Tertinggi adalah persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan, dalam hal ini minimal pendidikan yang ditamatkan adalah SLTP. Sehingga persentase penduduk yang berpendidikan SLTP ke atas merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang minimum pendidikannya SLTP.
- c Angka Melek Huruf (AMH)
Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin maupun lainnya serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari.

d Angka lahir hidup (ALH)

Lahir hidup merupakan suatu perbandingan banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang ibu dibandingkan banyaknya ibu yang melahirkan, di mana anak yang dilahirkan oleh seorang ibu menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun hanya beberapa saat, seperti jantung berdenyut, bernafas dan menangis.

e Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan (SAKIT)

Dapat didefinisikan sebagai persentase dari penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari, atau dikatakan pernah mengalami sakit.

f Persentase balita yang diimunisasi secara lengkap (IMUN)

Persentase dari balita yang pernah diimunisasi secara lengkap, minimal telah disuntik vaksinasi yang meliputi BCG (*Bacillus Calmette Guerin*) sebanyak satu kali, DPT (*Difteri, Pertusis, Tetanus*) sebanyak tiga kali, Polio sebanyak tiga kali, Campak/Morbili sebanyak satu kali, dan Hepatitis B sebanyak tiga kali.

g Persentase rumah tangga dengan fasilitas air bersih (AIR)

Persentase rumah tangga dengan fasilitas air bersih merupakan proporsi rumah tangga yang mempunyai sarana fasilitas air yang sesuai standar kesehatan (sumur, ledeng, pompa, sumur terlindung) terhadap seluruh rumah tangga.

- h. Persentase rumah tangga yang mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri (WC)

Persentase rumah tangga yang mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri merupakan proporsi rumah tangga yang memiliki tempat buang air besar/jamban sendiri yang dilengkapi dengan tempat penampungan permanen (septictank) terhadap seluruh rumah tangga.
- i. Persentase rumah tangga dengan jarak penampungan akhir >10m (JARAK)

Persentase rumah tangga dengan jarak penampungan akhir >10m ke sumber air merupakan proporsi rumah tangga dimana sumber airnya memiliki jarak dengan tempat penampungan akhir lebih dari 10 m terhadap seluruh rumah tangga.
- j. Rasio Ketidaktergantungan (RKT)

Rasio ketidaktergantungan merupakan proporsi banyaknya penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun lebih) yang tidak tergantung secara ekonomis kepada penduduk usia produktif (15-64 tahun).
- l. Persentase tenaga kerja di luar sektor pertanian (NON TANI)

Persentase tenaga kerja di luar sektor pertanian merupakan proporsi tenaga kerja yang bekerja di luar sektor pertanian terhadap seluruh tenaga kerja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Kondisi Geografis

Provinsi Sulawesi Barat dalam cakupan penelitian ini terdiri dari lima kabupaten, sementara Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 23 kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Barat, merupakan provinsi termuda yang mempunyai luas wilayah sebesar 16.787,18 km² atau sekitar 37 persen dari luas provinsi induknya (Sulawesi Selatan), dengan jumlah penduduk 996.843 jiwa (lihat tabel 1), berarti kepadatan penduduk per kilometer persegi di propinsi ini hanya mencapai 59 orang, dibanding propinsi induknya (Sulawesi Selatan) yang berkepadatan 164 jiwa/km².

Saat ini Propinsi Sulawesi Barat terbagi atas 5 Kabupaten: Polewali Mandar (16 kecamatan dengan 132 desa), Mamasa (15 kecamatan dengan 167 desa), Majene (8 kecamatan dengan 40 desa), Mamuju (15 kecamatan dengan 110 desa), dan Mamuju Utara(4 kecamatan dengan 33 desa). Dengan demikian secara rata rata setiap kecamatan terdiri sekitar 9-10 desa. Dan setiap kecamatan dihuni sekitar 17.100 orang, atau setiap desa dihuni sekitar 2000-an penduduk. Sebagai pembanding Sulawesi Selatan sebagai

provinsi induk mempunyai kepadatan per desa 2.615 jiwa dan per kecamatan 26.800 jiwa.

Dengan rentang wilayah seperti ini, masing-masing kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dihuni oleh proporsi penduduk yang tidak seimbang. Kabupaten Polewali Mandar yang mempunyai luas 12 % dari luas wilayah justru dihuni oleh 36,4 % jumlah penduduk (paling banyak) dan Majene (5,6 % dari luas wilayah) dihuni 13,2 % penduduk, sementara Kabupaten Mamuju yang mempunyai luas 47,7 % dari luas wilayah Sulawesi Barat hanya dihuni oleh 28,4 % jumlah penduduk (urutan kedua). Di bagian lain, Mamuju Utara yang mempunyai luas 18,1 % dari luas wilayah, hanya dihuni oleh 9,7 % jumlah penduduk.

2. Kondisi Ekonomi

Secara makro ekonomi Sulawesi Barat terus meningkat dari waktu ke waktu, mulai dari 2,5 triliun rupiah pada tahun 2000 (menurut harga konstan 2000) meningkat pada tahun 2005 menjadi 4,4 triliun rupiah. Ini berarti dalam 5 tahun meningkat sebesar 1,9 triliun. Atau secara rata rata, ekonomi Sulawesi Barat tumbuh sebesar 15,2 % per tahun dalam kurun waktu 2000-2005. Penggunaan harga konstan di sini dimaksudkan untuk melihat geliat produksi yang sesungguhnya, bukan diakibatkan karena perubahan harga seperti bila kita menggunakan harga berlaku (*current price*). Dengan besaran ini Produk Domestik Bruto per kapita Sulawesi Barat mencapai 4,5 juta rupiah

per tahun. Dibanding Sulawesi Selatan yang hampir 7 juta per tahun, jelas provinsi pemekaran ini masih jauh di belakang.

Sulawesi Barat merupakan daerah yang relatif mengandalkan sumberdaya alam untuk menopang kebutuhannya. Ini terlihat jelas dari besarnya peran sector pertanian di propinsi ini, yang mencapai 56,8 % (menurut harga konstan tahun 2000). Dengan menggunakan tahun 2000 sebagai tahun bertolak, pertumbuhan sektor tersebut hingga tahun 2005 mencapai 51,9 % atau sekitar 10,38 % per tahun.

Selain bertumpu pada sektor pertanian, terutama sub sektor perkebunan (coklat, sawit, jeruk) dan tanaman bahan makanan (padi dan palawija), Sulawesi Barat juga mempunyai 2 sektor yang punya kontribusi cukup lumayan, yang nanti bisa didorong lebih maju, yaitu sector perdagangan, hotel, dan restoran (12,24 %) dan jasa-jasa (12,42 %). Hal ini tidak mengherankan mengingat model usaha ini adalah yang paling mudah, dengan modal sedikit bisa melakukan usaha, dan marginnya relatif lumayan. Namun demikian, melihat prospeknya dimasa mendatang, sektor industri terkait perkebunan mempunyai peluang dan prospek yang baik untuk didorong dan ditingkatkan, mengingat bahan baku coklat dan sawit sangat potensial di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan bahan baku tersebut bisa diciptakan industri bahan makanan yang dari coklat atau industri minyak goreng, atau dari keduanya juga bisa diciptakan industri farmasi. Seiring

dengan itu, sektor transportasi dapat hidup atau dihidupkan untuk menopang distribusi barang, baik hasil produksi untuk dikirim ke luar Sulawesi Barat, maupun masuknya bahan penunjang yang masuk sebagai input produksi, untuk mempercepat putaran ekonomi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan mempromosikan Sulawesi Barat kepada para investor.

3. Kondisi Demografi

Dalam analisis sosial-ekonomi penduduk, tentunya masalah kependudukan atau demografi yang terdiri atas jumlah, umur dan jenis kelamin menjadi dasar pijakan. Jumlah akan menggambarkan permasalahan yang mungkin ada, sementara itu umur dan jenis kelamin akan berkaitan dengan karakteristik penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen utama, yaitu: kelahiran, kematian, migrasi. Selisih antara kelahiran dan kematian disebut pertumbuhan alamiah. Sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto.

Urbanisasi atau migrasi desa-kota ternyata pernah di pandang sebagai suatu hal yang positif dalam kepustakaan ekonomi pembangunan pada umumnya (Todaro,2004). Migrasi internal dianggap sebagai proses alamiah yang menyalurkan surplus tenaga kerja di daerah-daerah pedesaan ke sektor industri moderen di kota-kota yang daya serapnya lebih tinggi. Proses ini dipandang positif secara sosial, karena memungkinkan berlangsungnya suatu pergeseran sumber daya manusia dari tempat-tempat yang produk

marjinal sosialnya nol ke lokasi lain yang produk marjinal sosialnya bukan hanya positif, tetapi juga akan terus meningkat sehubungan dengan adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Proses ini kemudian diformulasikan dalam teori pembangunan Lewis (Todaro,2004).

Kekhawatiran yang mungkin timbul adalah arus perpindahan daerah pedesaan ke kota-kota telah jauh melampaui tingkat penciptaan atau penambahan lapangan kerja, sehingga urbanisasi yang saat ini berlangsung sedemikian deras telah jauh melampaui daya serap sektor-sektor industri maupun jasa-jasa pelayanan sosial yang ada di daerah-daerah perkotaan. Berdasarkan pengamatan terhadap kenyataan-kenyataan tersebut kita tidak bisa lagi memandang arus perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota sebagai faktor yang positif untuk mengatasi kelebihan permintaan. Sebaliknya sekarang urbanisasi harus dilihat sebagai faktor negatif yang menyebabkan surplus tenaga kerja perkotaan secara berlebihan, serta terus menerus memperburuk masalah-masalah pengangguran diberbagai daerah perkotaan, yang pada awalnya bersumber dari ketidakseimbangan struktural dan ekonomi antara daerah-daerah perkotaan dan pedesaan.

Secara umum gambaran penduduk Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2001 mencapai 885.726 jiwa, dan berdasarkan hasil SUSENAS 2005 penduduk Sulawesi Barat telah mencapai 996.843 jiwa, maka secara total terjadi laju pertumbuhan penduduk (LPP) mencapai 3,14 persen per-tahun.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Tahun 2001-2005

KABUPATEN/KOTA	2001	2002	2003	2004	2005	LPP (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SULAWESI SELATAN	7.009.369	7.087.060	7.257.097	7.401.464	7.496.706	1,74
01 KAB. SELAYAR	103.892	104.040	109.779	110.678	111.220	1,76
02 KAB. BULUKUMBA	353.970	355.528	365.418	375.983	379.371	1,79
03 KAB. BANTAENG	160.072	161.077	162.153	167.342	169.102	1,41
04 KAB. JENEPONTO	319.245	321.924	324.928	328.241	331.848	0,99
05 KAB. TAKALAR	232.178	232.178	241.200	244.873	248.162	1,72
06 KAB. GOWA	522.486	532.276	542.250	567.594	575.295	2,53
07 KAB. SINJAI	205.423	206.466	213.071	218.728	220.141	1,79
08 KAB. MAROS	275.548	279.023	282.542	291.986	296.336	1,89
09 KAB. PANGKEP	263.565	263.717	263.718	277.687	279.801	1,54
10 KAB. BARRU	151.085	153.511	155.714	157.982	158.500	1,23
11 KAB. BONE	651.746	655.538	685.590	688.080	694.320	1,63
12 KAB. SOPPENG	218.799	219.361	219.649	224.339	229.292	1,20
13 KAB. WAJO	359.683	361.079	364.820	363.922	364.290	0,32
14 KAB. SIDRAP	238.930	246.292	249.714	246.623	246.993	0,84
15 KAB. PINRANG	312.128	315.874	331.941	333.853	335.554	1,88
16 KAB. ENREKANG	168.337	170.392	176.046	179.443	182.174	2,05
17 KAB. LUWU	291.952	295.386	304.021	310.109	315.294	2,00
18 KAB. TANA TORAJA	395.744	398.785	401.849	422.604	427.286	1,99
19 KAB. LUWU UTARA	254.894	260.790	267.779	279.498	287.295	3,18
20 KAB. LUWU TIMUR	187.373	191.708	196.845	200.421	206.180	2,51
21 KOTA MAKASSAR	1.116.901	1.134.042	1.159.620	1.169.985	1.193.451	1,71
22 KOTA PARE-PARE	109.758	111.242	113.425	114.103	115.221	1,24
23 KOTA PALOPO	113.659	114.829	123.022	125.386	127.575	3,06
SULAWESI BARAT	885.726	903.111	944.337	969.649	996.843	3,14
01 KAB. POLMAS	333.476	338.897	357.794	357.852	363.418	2,24
02 KAB. MAJENE	121.561	122.940	128.783	130.527	131.717	2,09
03 KAB. MAMUJU	235.247	241.664	251.922	268.593	283.528	5,13
04 KAB. MAMASA	118.120	117.582	119.613	120.745	121.448	0,70
05 KAB. MATRA	77.322	82.028	86.225	91.932	96.732	6,28

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2001-2005

Bila dibandingkan dengan penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan hasil SUSENAS 2001 sekitar 7 juta jiwa, jika dibandingkan dengan penduduk

tahun 2005 (hasil SUSENAS 2005), maka secara total terjadi laju pertumbuhan penduduk (LPP) secara rata-rata mencapai 1,74 persen per-tahun.

Sementara itu kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang mengalami laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat adalah Gowa, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo. Secara umum peningkatan penduduk di daerah tersebut dikarenakan perubahan status menjadi kota satelit dan daerah hinterland, sehingga banyak pemukiman baru yang dikembangkan di daerah tersebut. Bila dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, secara umum mengalami percepatan laju pertumbuhan penduduk, hal ini disebabkan karena adanya pemekaran provinsi baru serta adanya geliat ekonomi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di sektor jasa pemerintahan dan di sektor industri hasil perkebunan kakao dan kelapa sawit (industri besar hasil perkebunan ada sebanyak 1 di Polewali Mandar, 2 di Mamuju dan 12 di Mamuju Utara).

Sumberdaya manusia merupakan faktor yang paling mendasar dalam pembangun di suatu wilayah. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 503.425 laki laki dan 493.418 perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin provinsi ini sebesar 102,03, yang berarti diantara 100 perempuan terdapat 102 laki-laki, hal ini dimungkinkan karena banyaknya tenaga kerja laki-laki yang terserap di sektor jasa pemerintahan dan industri

hasil perkebunan. Komposisi ini relative seimbang bagi daerah baru yang masih memerlukan tambahan jumlah penduduk sebagai subyek pembangunan, dibanding Sulawesi Selatan yang lebih banyak penduduk perempuannya (rasio jenis kelaminnya 94,52).

Dari lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju (sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat) dan Mamuju Utara memiliki rasio jenis kelamin di atas 100, dimana dari 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki, sehingga alasan penyerapan tenaga kerja laki-laki di sektor jasa pemerintahan dan sektor industri hasil perkebunan kakao serta kelapa sawit cukup masuk akal, karena di kedua kabupaten inilah menjadi pusat lokasi kegiatan kedua sektor lapangan usaha tersebut. Sementara itu untuk Kabupaten Mamasa antara penduduk laki-laki dan perempuan sangat seimbang, hal ini relatif dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiahnya, karena daerah tersebut akses transportasinya masih cukup sulit untuk dijangkau dan secara geografis bukan merupakan daerah yang strategis.

Secara umum, penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan masih didominasi kaum perempuan, tetapi untuk Kabupaten Luwu dan Luwu Utara laki-laki cenderung lebih banyak, hal ini dimungkinkan karena kedua daerah tersebut mirip dengan Kabupaten Mamuju Utara yang didominasi sektor industri hasil perkebunan, sedangkan di Tanah Toraja didominasi sektor pariwisata yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja laki-laki.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2005

KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	SEX RASIO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 KAB. SELAYAR	54.708	56.512	111.220	96,81
02 KAB. BULUKUMBA	180.761	198.610	379.371	91,01
03 KAB. BANTAENG	78.744	90.358	169.102	87,15
04 KAB. JENEPONTO	159.792	172.056	331.848	92,87
05 KAB. TAKALAR	116.919	131.243	248.162	89,09
06 KAB. GOWA	283.413	291.882	575.295	97,10
07 KAB. SINJAI	108.818	111.323	220.141	97,75
08 KAB. MAROS	136.727	159.609	296.336	85,66
09 KAB. PANGKEP	137.313	142.488	279.801	96,37
10 KAB. BARRU	77.172	81.328	158.500	94,89
11 KAB. BONE	324.762	369.558	694.320	87,88
12 KAB. SOPPENG	106.226	123.066	229.292	86,32
13 KAB. WAJO	168.699	195.591	364.290	86,25
14 KAB. SIDRAP	117.798	129.195	246.993	91,18
15 KAB. PINRANG	163.847	171.707	335.554	95,42
16 KAB. ENREKANG	90.150	92.024	182.174	97,96
17 KAB. LUWU	161.442	153.852	315.294	104,93
18 KAB. TANA TORAJA	223.658	203.628	427.286	109,84
19 KAB. LUWU UTARA	147.761	139.534	287.295	105,90
20 KAB. LUWU TIMUR	102.820	103.360	206.180	99,48
21 KOTA MAKASSAR	582.579	610.872	1.193.451	95,37
22 KOTA PARE-PARE	54.422	60.799	115.221	89,51
23 KOTA PALOPO	63.313	64.262	127.575	98,52
SULAWESI SELATAN	3.641.844	3.852.857	7.494.701	94,52
01 KAB. POLMAS	181.612	181.806	363.418	99,89
02 KAB. MAJENE	63.905	67.812	131.717	94,24
03 KAB. MAMUJU	146.837	136.691	283.528	107,42
04 KAB. MAMASA	60.959	60.489	121.448	100,78
05 KAB. MATRA	50.112	46.620	96.732	107,49
SULAWESI BARAT	503.425	493.418	996.843	102,03

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2005

B Kondisi Sumberdaya Manusia

Kualitas SDM dapat ditunjukkan oleh beberapa indikator, menurut Ananta dan Hatmadji (1985), beberapa indikator yang berkaitan dengan kualitas SDM antara lain adalah indikator pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Sasmito (2001) dalam penelitiannya mengatakan bahwa indikator tenaga kerja juga dapat digunakan sebagai tolok ukur kualitas SDM. Berikut akan dibahas bagaimana gambaran kualitas SDM dibentuk dengan melihat gambaran kualitas SDM kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan keempat indikator yang ditentukan .

Untuk melihat gambaran kualitas SDM di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan secara umum, dapat kita lihat dari gambaran masing-masing kabupaten/kota yang membentuknya. Kualitas SDM di masing-masing kabupaten/kota tersebut akan mempengaruhi kualitas SDM di kedua provinsi tersebut, secara deskriptif akan diuraikan bagaimana gambaran kondisi indikator-indikator tersebut.

a. Rasio Ketidaktergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau berkembang. Sehingga rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting.

Tabel 3.
Rasio Ketergantungan dan Rasio Ketidaktergantungan
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Tahun 2005

KABUPATEN/KOTA	Usia 0 - 14	Usia 15 - 64	Usia 65+	RK Muda	RK Tua	RK Total	RKT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 KAB. SELAYAR	34.272	68.428	8.520	50,08	12,45	62,54	37,46
02 KAB. BULUKUMBA	99.556	256.887	22.928	38,75	8,93	47,68	52,32
03 KAB. BANTAENG	53.256	109.035	6.811	48,84	6,25	55,09	44,91
04 KAB. JENEPONTO	104.016	212.166	15.666	49,03	7,38	56,41	43,59
05 KAB. TAKALAR	75.206	159.076	13.880	47,28	8,73	56,00	44,00
06 KAB. GOWA	183.972	363.339	27.984	50,63	7,70	58,34	41,66
07 KAB. SINJAI	70.922	137.531	11.688	51,57	8,50	60,07	39,93
08 KAB. MAROS	100.119	184.938	11.279	54,14	6,10	60,24	39,76
09 KAB. PANGKEP	92.619	173.709	13.473	53,32	7,76	61,07	38,93
10 KAB. BARRU	45.892	101.780	10.828	45,09	10,64	55,73	44,27
11 KAB. BONE	207.408	451.686	35.226	45,92	7,80	53,72	46,28
12 KAB. SOPPENG	58.357	153.179	17.756	38,10	11,59	49,69	50,31
13 KAB. WAJO	99.048	241.740	23.502	40,97	9,72	50,69	49,31
14 KAB. SIDRAP	69.948	161.298	15.747	43,37	9,76	53,13	46,87
15 KAB. PINRANG	107.140	209.529	18.885	51,13	9,01	60,15	39,85
16 KAB. ENREKANG	63.227	106.293	12.654	59,48	11,90	71,39	28,61
17 KAB. LUWU	111.052	190.814	13.428	58,20	7,04	65,24	34,76
18 KAB. TANA TORAJA	155.108	246.094	26.084	63,03	10,60	73,63	26,37
19 KAB. LUWU UTARA	102.803	170.100	14.392	60,44	8,46	68,90	31,10
20 KAB. LUWU TIMUR	68.556	130.080	7.544	52,70	5,80	58,50	41,50
21 KOTA MAKASSAR	348.263	805.258	39.930	43,25	4,96	48,21	51,79
22 KOTA PARE-PARE	34.407	75.809	5.005	45,39	6,60	51,99	48,01
23 KOTA PALOPO	43.685	78.806	5.084	55,43	6,45	61,88	38,12
SULAWESI SELATAN	2.328.832	4.787.575	378.294	48,64	7,90	56,54	43,46
01 KAB. POLMAS	124.514	222.372	16.532	55,99	7,43	63,43	36,57
02 KAB. MAJENE	45.679	80.821	5.217	56,52	6,46	62,97	37,03
03 KAB. MAMUJU	106.898	168.483	8.147	63,45	4,84	68,28	31,72
04 KAB. MAMASA	45.355	70.030	6.063	64,77	8,66	73,42	26,58
05 KAB. MATRA	37.152	58.644	936	63,35	1,60	64,95	35,05
SULAWESI BARAT	359.598	600.350	36.895	59,90	6,15	66,04	33,96

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2005

Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, jadi semakin rendah beban ketergantungan, semakin tinggi rasio ketidaktergantungannya.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Sebaliknya, angka yang menunjukkan banyaknya penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja, semakin tinggi nilainya maka semakin baik kualitas SDM-nya, karena berarti penduduk yang produktif akan

menanggung penduduk non produktif lebih sedikit. Hal ini akan berimplikasi terhadap kesejahteraan dan kualitas masyarakatnya.

Rasio ketidaktergantungan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 43,46 persen, ini berarti memiliki rasio ketergantungan total adalah sebesar 56,54 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 57 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 56,54 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 48,64 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 7,90 persen.

Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2005 penduduk usia kerja di Sulawesi Selatan masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Secara umum struktur penduduk Sulawesi Selatan adalah struktur penduduk muda.

Sementara itu di Provinsi Sulawesi Barat rasio ketidaktergantungan sebesar 33,96 persen, ini berarti memiliki rasio ketergantungan total adalah sebesar 66,04 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 66 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 66,04 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 59,90 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 6,15 persen.

Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2005 penduduk usia kerja di Sulawesi Barat masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua serta lebih banyak beban ketergantungannya dibandingkan Sulawesi Selatan.

Secara umum struktur penduduk Sulawesi Barat adalah struktur penduduk yang lebih muda jika dibandingkan dengan struktur penduduk Sulawesi Selatan. Dilihat dari komposisi usianya, penduduk Sulawesi Barat dominan dibentuk oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun), sebesar 60,23 persen. Penduduk usia muda (0-14 tahun) sekitar 36,07 persen, dan sisanya sebesar 3,70 persen berusia di atas 64 tahun. Dengan komposisi usia seperti itu, potensi penduduk Sulawesi Barat relatif memadai untuk berjuang menata daerahnya. Kabupaten-kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat rasio ketidaktergantungannya relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Persentase terendah adalah Kabupaten Tana Toraja sebesar 26,37 persen dan tertinggi Kabupaten Bulukumba sebesar 52,32 persen. Untuk Provinsi Sulawesi Barat, rasio ketidaktergantungan tertinggi adalah Kabupaten Majene dan terendah adalah Kabupaten Mamasa. Hal ini dimungkinkan karena Kabupaten Majene menjadi sentra pendidikan setingkat SLTA dan perguruan tinggi di Sulawesi Barat, sehingga mampu menambah jumlah penduduk usia produktif, sebaliknya dari

Kabupaten Mamasa banyak penduduk usia produktif yang keluar merantau karena alasan pendidikan atau kurangnya lapangan pekerjaan.

b. Persentase Tenaga Kerja di Luar Sektor Pertanian

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu daerah. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih. Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.

Proporsi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan angka yang menunjukkan distribusi/penyebaran penduduk bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Menurut Sensus Penduduk 2000, yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja, sedangkan lapangan usaha dibedakan menjadi: sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.

Tabel 4.
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Tahun 2005

KABUPATEN/KOTA	Sektor Pertanian	Sektor Diluar Pertanian
(1)	(2)	(3)
01 KAB. SELAYAR	56,24	43,76
02 KAB. BULUKUMBA	41,86	58,14
03 KAB. BANTAENG	64,27	35,73
04 KAB. JENEPONTO	52,81	47,19
05 KAB. TAKALAR	49,17	50,83
06 KAB. GOWA	39,05	60,95
07 KAB. SINJAI	66,27	33,73
08 KAB. MAROS	45,18	54,82
09 KAB. PANGKEP	47,48	52,52
10 KAB. BARRU	39,96	60,04
11 KAB. BONE	60,93	39,07
12 KAB. SOPPENG	63,39	36,61
13 KAB. WAJO	57,85	42,15
14 KAB. SIDRAP	51,41	48,59
15 KAB. PINRANG	62,81	37,19
16 KAB. ENREKANG	73,32	26,68
17 KAB. LUWU	75,45	24,55
18 KAB. TANA TORAJA	83,75	16,25
19 KAB. LUWU UTARA	70,09	29,91
20 KAB. LUWU TIMUR	61,02	38,98
21 KOTA MAKASSAR	2,34	97,66
22 KOTA PARE-PARE	6,55	93,45
23 KOTA PALOPO	29,85	70,15
SULAWESI SELATAN	48,50	51,50
01 KAB. POLMAS	67,46	32,54
02 KAB. MAJENE	52,36	47,64
03 KAB. MAMUJU	78,14	21,86
04 KAB. MAMASA	86,36	13,64
05 KAB. MATRA	85,24	14,76
SULAWESI BARAT	72,63	27,37

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2005

Semakin besar jumlah tenaga kerja dalam satu daerah maka semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka pengangguran akan terjadi. Di samping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif. Sehingga nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun. Namun semua ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi.

Semakin tinggi proporsi tenaga kerja di suatu sektor berarti struktur ketenagakerjaan lebih banyak terpusat di sektor tersebut. Sehingga kebijakan ketenagakerjaan seharusnya lebih difokuskan kepada sektor tersebut. Pergeseran distribusi penduduk bekerja dari lapangan pekerjaan pertanian menuju industri dan jasa merupakan fenomena terjadinya transformasi/perubahan struktural perekonomian.

Disamping itu, indikator ini membantu pemerintah dalam memberikan fokus kebijakan ketenagakerjaan. Misalnya, apabila proporsi penduduk yang bekerja terbanyak terdapat di sektor pertanian maka pemerintah dapat lebih menitikberatkan pembangunan ketenagakerjaan di sektor ini.

Persentase Tenaga Kerja di Luar Sektor Pertanian untuk kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 4. Secara umum, kabupaten-kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Persentase Tenaga Kerja di Luar Sektor Pertanian secara rata-rata sebesar 27,37 persen, hal ini dimungkinkan karena ketersediaan lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian masih sangat rendah jika dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara rata-rata telah mencapai 51,50 persen, dimana sektor industri, perdagangan, transportasi dan jasa-jasa secara kasat mata sudah jauh berkembang dibandingkan kondisi Sulawesi Barat. Sehingga penduduk usia kerja yang telah bekerja di Sulawesi Barat dominan terserap ke sektor pertanian, hal ini mencapai 72,63 persen, dimana sebagian besar penduduknya bekerja di sub sektor perkebunan, perikanan dan pertanian tanaman bahan makanan, dibandingkan Sulawesi Selatan yang hanya mencapai 48,50 persen.

Persentase penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian terendah adalah Kabupaten Mamasa sebesar 13,64 persen dan tertinggi Kota Makassar sebesar 97,66 persen. Untuk Provinsi Sulawesi Barat, secara umum masih dibawah 50 persen.

c. Angka Lahir Hidup

Rata-rata Angka Lahir Hidup (ALH) memberikan informasi mengenai rata-rata anak yang dimiliki wanita menurut kelompok umur tertentu. Berbeda dengan indikator Angka Kelahiran (jumlah kelahiran, CBR, ASFR dan TFR), indikator Anak Lahir Hidup atau juga sering disebut dengan *Children Ever Born* mengandung pengertian yang bersifat '*longitudinal*' dan

bukan gambaran penampang lintang. Indikator Anak Lahir Hidup ini diperoleh dari informasi atas pertanyaan 'Berapa jumlah anak yang telah Ibu lahirkan selama ini?' Jawabannya mencerminkan semua anak yang telah lahir, dari sejak menikah pertama kali sampai saat wawancara (bukan hanya anak yang lahir pada saat ini atau tahun ini). Jadi rata-rata jumlah anak lahir hidup menurut umur mencerminkan perjalanan fertilitas ibu sampai pada umur yang bersangkutan.

Tabel 5 mengenai ALH menunjukkan bahwa rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang ibu di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2005 yaitu antara 3 dan 4 anak. Ini menunjukkan kemampuan reproduksi perempuan menurut kabupaten/kota secara rata-rata untuk melahirkan anak dalam kondisi lahir hidup.

Secara umum, ALH kabupaten-kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan relatif sama antar kabupaten/kota, rata-rata anak yang dilahirkan hidup oleh seorang ibu di kedua provinsi tersebut berkisar tiga orang anak, yang terendah di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Soppeng sebesar 2,58 (2 sampai 3 anak) dan tertinggi adalah Kabupaten Enrekang sebesar 3,97 (3 sampai 4 anak). Sementara yang terendah di Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju Utara sebesar 2,67 (2 sampai 3 anak) dan tertinggi adalah Kabupaten Polewali Mandar sebesar 3,54 (3 sampai 4 anak).

Tabel 5.
Angka Lahir Hidup
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Tahun 2005

KABUPATEN/KOTA	ALH	KABUPATEN/KOTA	ALH
(1)	(2)	(1)	(2)
01 KAB. SELAYAR	2,90	01 KAB. POLMAS	3,54
02 KAB. BULUKUMBA	2,91	02 KAB. MAJENE	3,41
03 KAB. BANTAENG	3,27	03 KAB. MAMUJU	3,13
04 KAB. JENEPONTO	3,61	04 KAB. MAMASA	3,33
05 KAB. TAKALAR	3,10	05 KAB. MATRA	2,67
06 KAB. GOWA	2,93		
07 KAB. SINJAI	3,62		
08 KAB. MAROS	3,59		
09 KAB. PANGKEP	3,41		
10 KAB. BARRU	3,61		
11 KAB. BONE	3,20		
12 KAB. SOPPENG	2,58		
13 KAB. WAJO	3,02		
14 KAB. SIDRAP	3,09		
15 KAB. PINRANG	3,50		
16 KAB. ENREKANG	3,97		
17 KAB. LUWU	3,81		
18 KAB. TANA TORAJA	3,95		
19 KAB. LUWU UTARA	3,69		
20 KAB. LUWU TIMUR	3,14		
21 KOTA MAKASSAR	3,15		
22 KOTA PARE-PARE	3,23		
23 KOTA PALOPO	3,44		
SULAWESI SELATAN	3,29	SULAWESI BARAT	3,30

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2005

Semakin tinggi ALH derajat kesehatan masyarakat semakin baik dan berkaitan dengan ketersediaan sarana kesehatan. Hitungan ini bermanfaat untuk mengetahui rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh sekelompok wanita dari mulai memasuki masa reproduksi hingga saat

wawancara. Bila tanda-tanda kehidupan tidak terlihat maka anak lahir tersebut didefinisikan sebagai anak lahir mati. Semakin tinggi nilainya semakin baik kualitas SDM dalam hal menjaga kesehatan kandungan yang didukung infrastruktur kesehatan dan kecukupan gizi.

d. Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Kesehatan

Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan diperoleh dari keterangan kesehatan Survei Sosial Ekonomi Nasional, dengan istilah mengalami keluhan kesehatan. Keluhan Kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau hal lain dan keluhan kesehatan tersebut mengakibatkan tidak dapat melakukan kegiatan secara normal dalam bekerja, sekolah atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya karena keluhan kesehatan tersebut.

Penduduk yang pernah mengalami gangguan kesehatan untuk kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan secara umum dapat dilihat pada tabel 6.

Penduduk yang pernah mengalami gangguan kesehatan relatif bervariasi antar kabupaten/kota di kedua provinsi. Persentase angka kesakitan secara rata-rata mencapai 15,3 persen, dimana masih ada 10 kabupaten/kota yang Persentase angka kesakitannya masih diatas rata-rata Sulawesi Selatan.

Tabel 6.
Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Kesehatan
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Tahun 2005

KABUPATEN/KOTA	SAKIT	KABUPATEN/KOTA	SAKIT
(1)	(2)	(1)	(2)
01 KAB. SELAYAR	14,49	01 KAB. POLMAS	19,54
02 KAB. BULUKUMBA	13,99	02 KAB. MAJENE	11,30
03 KAB. BANTAENG	20,85	03 KAB. MAMUJU	26,29
04 KAB. JENEPONTO	22,84	04 KAB. MAMASA	19,85
05 KAB. TAKALAR	17,67	05 KAB. MATRA	35,50
06 KAB. GOWA	14,21		
07 KAB. SINJAI	18,51		
08 KAB. MAROS	10,38		
09 KAB. PANGKEP	11,85		
10 KAB. BARRU	19,76		
11 KAB. BONE	14,11		
12 KAB. SOPPENG	7,46		
13 KAB. WAJO	13,73		
14 KAB. SIDRAP	10,39		
15 KAB. PINRANG	14,00		
16 KAB. ENREKANG	14,58		
17 KAB. LUWU	16,36		
18 KAB. TANA TORAJA	5,26		
19 KAB. LUWU UTARA	26,50		
20 KAB. LUWU TIMUR	21,70		
21 KOTA MAKASSAR	17,08		
22 KOTA PARE-PARE	13,77		
23 KOTA PALOPO	20,05		
SULAWESI SELATAN	15,30	SULAWESI BARAT	27,37

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2005

Dibandingkan dengan Sulawesi Barat, persentase angka kesakitannya secara rata-rata mencapai 21,96 persen, dimana masih ada 2 kabupaten yang persentase angka kesakitannya masih diatas rata-rata Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju masing-masing sebesar sebesar

35,5 persen dan 26,3 persen, sedangkan taraf kesehatan paling baik di Sulawesi Barat adalah Kabupaten Majene, dimana persentase angka kesakitannya hanya mencapai 11,3 persen dari jumlah penduduknya.

Jika dibandingkan antara kedua provinsi tersebut, persentase angka kesakitan terendah adalah Kabupaten Tana Toraja sebesar 5,26 persen dan tertinggi adalah Kabupaten Mamuju Utara sebesar 35,50 persen. Hal ini dimungkinkan karena di Kabupaten Tana Toraja selama ini menjadi daerah tujuan utama sektor pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan sehingga tingkat ketersediaan infrastruktur kesehatan relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakatnya, berbeda dengan Kabupaten Mamuju Utara yang baru saja terbentuk dan belum memiliki fasilitas penunjang kesehatan masyarakat yang memadai, sehingga memungkinkan tingginya angka kesakitan masyarakat. Untuk Provinsi Sulawesi Barat, secara persentase, angka kesakitannya masih diatas Sulawesi Selatan.

e. Persentase Balita dengan Imunisasi Lengkap

Imunisasi atau biasa disebut vaksinasi adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntikkan atau diminumkan (diteteskan dalam mulut) dengan maksud untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Perlu dibedakan antara suntikan pengobatan dan suntikan imunisasi, karena

suntikan pengobatan ditujukan kepada anak yang sakit, sementara suntikan imunisasi ditujukan kepada anak yang sehat. Kelengkapan dari imunisasi akan menyiapkan generasi penerus yang lebih sehat, serta mencerminkan kesadaran orang tua akan pentingnya kesehatan anak.

Persentase dari balita yang pernah diimunisasi secara lengkap, dimana vaksinasinya berupa BCG (*Bacillus Calmette Guerin*) sebanyak satu kali, DPT (*Difteri, Pertusis, Tetanus*) sebanyak tiga kali, Polio sebanyak tiga kali, Campak/Morbili sebanyak satu kali, dan Hepatitis B sebanyak tiga kali. Secara umum, balita yang pernah diimunisasi dengan lengkap sangat bervariasi antar kabupaten/kota di kedua provinsi. Persentase balita yang sudah diimunisasi dengan lengkap menunjukkan kesadaran dan pengetahuan orang tua akan pentingnya kesehatan anak balita, persentase dapat dilihat pada tabel 7. Secara rata-rata, balita di Sulawesi Selatan yang telah mendapatkan imunisasi lengkap sebanyak 31,58 persen, masih terdapat 14 kabupaten/kota yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Persentase balita dengan imunisasi lengkap terendah adalah Kabupaten Selayar sebesar 7,83 persen dan tertinggi adalah Kota Palopo sebesar 67,94 persen.

Untuk Provinsi Sulawesi Barat, secara umum masih dibawah 26 persen, dimana rata-rata balita yang sudah diimunisasi dengan lengkap baru mencapai 16,85 persen, itupun masih ada tiga kabupaten yang berada

dibawah rata-rata Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Majene, Mamuju dan Mamuju Utara. Hal ini dimungkinkan adanya kelemahan dalam perencanaan program imunisasi rutin di provinsi termuda ini.

Tabel 7.
Persentase Balita dengan Imunisasi Lengkap
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Tahun 2005

KABUPATEN/KOTA	IMUN	KABUPATEN/KOTA	IMUN
(1)	(2)	(1)	(2)
01 KAB. SELAYAR	7,83	01 KAB. POLMAS	22,55
02 KAB. BULUKUMBA	8,01	02 KAB. MAJENE	12,76
03 KAB. BANTAENG	28,14	03 KAB. MAMUJU	12,31
04 KAB. JENEPONTO	20,52	04 KAB. MAMASA	25,72
05 KAB. TAKALAR	10,61	05 KAB. MATRA	7,91
06 KAB. GOWA	27,71		
07 KAB. SINJAI	26,27		
08 KAB. MAROS	20,44		
09 KAB. PANGKEP	26,08		
10 KAB. BARRU	30,81		
11 KAB. BONE	26,41		
12 KAB. SOPPENG	22,29		
13 KAB. WAJO	20,37		
14 KAB. SIDRAP	51,09		
15 KAB. PINRANG	27,68		
16 KAB. ENREKANG	43,05		
17 KAB. LUWU	37,48		
18 KAB. TANA TORAJA	36,87		
19 KAB. LUWU UTARA	40,57		
20 KAB. LUWU TIMUR	44,47		
21 KOTA MAKASSAR	43,06		
22 KOTA PARE-PARE	51,36		
23 KOTA PALOPO	67,94		
SULAWESI SELATAN	31,58	SULAWESI BARAT	16,85

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2005

Rendahnya persentase balita dengan imunisasi lengkap dimungkinkan karena kurangnya perencanaan dan sosialisasi menjadi kendala kesuksesan program imunisasi rutin di daerah-daerah. Menurut Soepardi (2006) kemampuan manajemen imunisasi sejumlah Kepala Seksi Imunisasi di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten masih perlu ditingkatkan agar program imunisasi rutin berjalan dengan baik. Dikatakan, apabila program imunisasi rutin berjalan dengan baik maka penanggulangan penyakit menular yang bisa dicegah dengan imunisasi tidak perlu mengandalkan program nasional seperti pekan imunisasi nasional (PIN) untuk polio. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pengetahuan tenaga kesehatan tentang imunisasi di tingkat puskesmas di Pulau Jawa, pengetahuan tenaga kesehatan sudah cukup baik. Artinya tidak ada masalah dengan tenaga kesehatan di puskesmas. Justru yang menjadi masalah adalah kemampuan manajemen dari Kepala Seksi Imunisasi di tingkat Dinas Kabupaten. Misalnya, masih ditemukan kelemahan dalam perencanaan program imunisasi sehingga di beberapa kabupaten terkadang tidak ada vaksin. Sementara di daerah lain vaksin berlebih. Ditegaskannya, hampir di setiap provinsi memiliki kabupaten yang lemah dalam pelaksanaan program imunisasi. Khusus di kabupaten atau daerah yang baru dimekarkan masih sangat kurang tenaga kesehatan yang memahami manajemen program imunisasi. Lebih jauh dikatakan, di era desentralisasi tugas pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kabupaten dalam

pelaksanaan program imunisasi rutin menjadi lebih berat. Pasalnya, biaya operasional pelaksanaan program menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sedangkan peran pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan sebatas penyediaan dan memberi bantuan teknis.

Kelengkapan imunisasi berkaitan dengan kesehatan masyarakat utamanya generasi yang saat ini masih berusia balita.

f. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan dalam hal ini adalah SLTP. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar SLTP merupakan proporsi penduduk yang bersekolah di SLTP dari penduduk usia 13-15 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi sekolah penduduk pada jenjang SLTP. Semakin tinggi nilainya semakin baik. berarti menunjukkan kemampuan pendidikan SLTP dalam menyerap penduduk usia 13-15 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat dalam daerah tersebut sudah menikmati program pendidikan dasar 9 tahun.

Angka Partisipasi Kasar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (APK SLTP) untuk melihat sejauh mana program wajib belajar 9 tahun diterapkan oleh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, hal ini

dapat dilihat pada tabel 8. Secara umum, APK SLTP di kedua provinsi sudah cukup tinggi, yaitu diatas 60 persen.

Secara rata-rata di Provinsi Sulawesi Selatan partisipasi kasar SLTP sebesar 71,01 persen atau sebesar 336.221 siswa yang telah duduk di bangku SLTP dari 473.485 penduduk yang berusia 13-15 tahun, sementara di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 62,74 persen atau sebesar 39.451 siswa yang telah duduk di bangku SLTP dari 62.878 penduduk yang berusia 13-15 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari 60 persen penduduk berusia standar 13 – 15 tahun telah tertampung di bangku pendidikan SLTP di kedua provinsi tersebut.

Persentase terendah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Wajo sebesar 39,42 persen dan tertinggi Kota Pare-pare sebesar 96,61 persen. Untuk Provinsi Sulawesi Barat, APK SLTP tertinggi adalah Kabupaten Mamasa dan yang terendah adalah Kabupaten Polewali Mandar.

Rendahnya angka partisipasi kasar SLTP di Wajo bisa dimungkinkan karena akses ke sekolah cukup jauh atau dimungkinkan karena rasio jenis kelaminnya jauh lebih banyak perempuan sehingga paradigma bahwa anak perempuan cukup hanya sampai jenjang pendidikan SD saja, hal ini dilihat dari APK SD sebesar 55,03 persen kemudian turun menjadi 39,42 persen pada APK SLTP, sementara pola umum di kedua provinsi tersebut adalah mengalami peningkatan.

Tabel 8.
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Dasar
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Tahun 2005

KABUPATEN/KOTA	SD	SLTP	Usia 7 - 12	Usia 13 - 15	APK SD	APK SLTP
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)
01 KAB. SELAYAR	7.884	3.772	13.712	5.388	57,50	70,01
02 KAB. BULUKUMBA	24.612	18.528	49.401	22.626	49,82	81,89
03 KAB. BANTAENG	10.338	5.117	22.678	10.343	45,59	49,47
04 KAB. JENEPONTO	22.942	12.590	45.546	23.194	50,37	54,28
05 KAB. TAKALAR	14.235	9.593	32.775	15.081	43,43	63,61
06 KAB. GOWA	36.828	23.748	80.325	34.869	45,85	68,11
07 KAB. SINJAI	16.546	9.847	32.276	13.415	51,26	73,40
08 KAB. MAROS	20.650	13.950	40.170	19.427	51,41	71,81
09 KAB. PANGKEP	19.791	11.835	40.725	20.340	48,60	58,19
10 KAB. BARRU	8.878	8.543	19.116	10.317	46,44	82,81
11 KAB. BONE	46.500	25.266	85.452	44.124	54,42	57,26
12 KAB. SOPPENG	11.811	9.172	24.626	12.463	47,96	73,59
13 KAB. WAJO	22.313	8.976	40.548	22.772	55,03	39,42
14 KAB. SIDRAP	16.704	11.832	30.624	16.356	54,55	72,34
15 KAB. PINRANG	23.442	13.878	44.297	20.979	52,92	66,15
16 KAB. ENREKANG	12.704	9.703	25.081	12.023	50,65	80,70
17 KAB. LUWU	23.456	19.264	49.480	23.708	47,41	81,26
18 KAB. TANA TORAJA	37.828	28.996	72.268	31.984	52,34	90,66
19 KAB. LUWU UTARA	20.208	12.186	43.704	18.044	46,24	67,53
20 KAB. LUWU TIMUR	12.220	9.244	27.340	11.348	44,70	81,46
21 KOTA MAKASSAR	65.542	57.067	136.161	69.706	48,14	81,87
22 KOTA PARE-PARE	5.837	6.479	15.192	6.706	38,42	96,61
23 KOTA PALOPO	9.262	6.635	19.503	8.272	47,49	80,21
SULAWESI SELATAN	490.531	336.221	991.000	473.485	49,50	71,01
01 KAB. POLMAS	28.021	12.998	52.288	23.835	53,59	54,53
02 KAB. MAJENE	9.128	6.468	19.182	8.909	47,59	72,60
03 KAB. MAMUJU	21.963	11.025	44.640	17.477	49,20	63,08
04 KAB. MAMASA	9.306	5.828	18.236	7.473	51,03	77,99
05 KAB. MATRA	6.408	3.132	14.688	5.184	43,63	60,42
SULAWESI BARAT	74.826	39.451	149.034	62.878	50,21	62,74

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2005

g. Persentase Penduduk yang Berpendidikan SLTP ke atas

Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas (penduduk berusia produktif) yang berpendidikan SLTP ke atas untuk melihat sejauh mana masyarakat mendapatkan pendidikan, Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Indikator ini dapat digunakan untuk menunjukkan pencapaian pembangunan di bidang pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah, serta untuk mengevaluasi kualitas pendidikan penduduk dengan program pendidikan dasar 9 tahun sebagai acuan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas sumber daya manusianya, sehingga potensi sumber daya manusia disuatu wilayah dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, dapat dilihat pada tabel 9.

Secara rata-rata, penduduk yang berijazah minimal SLTP di kedua provinsi diatas 30 persen, dimana Sulawesi Selatan memiliki penduduk yang minimal berijazah SLTP sebesar 43,64, sedangkan Sulawesi Barat memiliki penduduk yang minimal berijazah SLTP sebesar 30,43 persen. Persentase terendah adalah Kabupaten Wajo sebesar 23,41 persen dan tertinggi Kota Makassar sebesar 70,82 persen.

Tabel 9.
Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SLTP ke atas
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Tahun 2005

KABUPATEN/KOTA	% SLTP	% SLTA	% PT	% Jumlah
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 KAB. SELAYAR	14,57	13,88	4,31	32,76
02 KAB. BULUKUMBA	17,24	22,19	7,38	46,81
03 KAB. BANTAENG	12,45	14,11	4,21	30,77
04 KAB. JENEPONTO	16,61	11,50	2,47	30,57
05 KAB. TAKALAR	17,85	14,49	3,35	35,69
06 KAB. GOWA	16,17	18,28	4,98	39,43
07 KAB. SINJAI	15,71	11,28	4,11	31,09
08 KAB. MAROS	13,03	18,01	4,66	35,71
09 KAB. PANGKEP	13,07	14,69	6,03	33,80
10 KAB. BARRU	16,22	15,43	3,66	35,31
11 KAB. BONE	15,25	14,72	4,37	34,34
12 KAB. SOPPENG	18,85	16,14	5,34	40,33
13 KAB. WAJO	11,71	9,56	2,14	23,41
14 KAB. SIDRAP	18,33	15,53	2,95	36,81
15 KAB. PINRANG	19,02	14,86	3,81	37,69
16 KAB. ENREKANG	21,01	24,05	5,88	50,94
17 KAB. LUWU	21,70	19,48	2,28	43,46
18 KAB. TANA TORAJA	24,79	19,78	2,78	47,35
19 KAB. LUWU UTARA	20,43	16,02	3,19	39,64
20 KAB. LUWU TIMUR	20,08	15,26	2,93	38,28
21 KOTA MAKASSAR	18,90	38,14	13,78	70,82
22 KOTA PARE-PARE	23,27	32,18	9,17	64,62
23 KOTA PALOPO	22,77	30,42	9,88	63,07
SULAWESI SELATAN	17,63	20,16	5,84	43,64
01 KAB. POLMAS	12,18	9,84	2,82	24,84
02 KAB. MAJENE	19,17	20,01	5,58	44,76
03 KAB. MAMUJU	15,71	12,75	1,97	30,43
04 KAB. MAMASA	17,79	11,67	1,91	31,38
05 KAB. MATRA	16,44	12,87	1,57	30,88
SULAWESI BARAT	15,17	12,52	2,73	30,43

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2005

Untuk Provinsi Sulawesi Barat, dari 30,43 persen penduduk yang minimal berijazah SLTP, terdiri dari 15,17 persen yang berijazah SLTP, 12,52 persen yang berijazah SLTA dan hanya 2,73 persen yang memiliki ijazah perguruan tinggi, sementara untuk tingkat kabupaten, penduduk yang minimal berijazah SLTP tertinggi adalah Kabupaten Majene (44,76 persen), dimana didominasi oleh ijazah SLTA (20,01 persen), hal ini ditunjang oleh status Kabupaten Majene sebagai sentra pendidikan di Sulawesi Barat, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Polewali Mandar (24,84 persen).

h. Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas

Angka Melek Huruf (AMH) dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang belum pernah bersekolah atau tidak tamat SD, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual.

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas atau penduduk berusia produktif yang mempunyai kemampuan dalam hal membaca huruf latin maupun huruf lainnya.

Tabel 10.
Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Tahun 2005

KABUPATEN/KOTA	BISA BACA TULIS	TIDAK BISA BACA TULIS	ANGKA MELEK HURUF	ANGKA BUTA HURUF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 KAB. SELAYAR	66.168	10.780	85,99	14,01
02 KAB. BULUKUMBA	236.822	42.993	84,64	15,36
03 KAB. BANTAENG	85.245	30.601	73,58	26,42
04 KAB. JENEPONTO	159.708	68.124	70,10	29,90
05 KAB. TAKALAR	133.421	39.535	77,14	22,86
06 KAB. GOWA	306.327	84.996	78,28	21,72
07 KAB. SINJAI	121.141	28.078	81,18	18,82
08 KAB. MAROS	153.917	42.300	78,44	21,56
09 KAB. PANGKEP	157.401	29.781	84,09	15,91
10 KAB. BARRU	95.588	17.020	84,89	15,11
11 KAB. BONE	413.418	73.494	84,91	15,09
12 KAB. SOPPENG	145.335	25.600	85,02	14,98
13 KAB. WAJO	211.806	53.436	79,85	20,15
14 KAB. SIDRAP	146.508	30.537	82,75	17,25
15 KAB. PINRANG	198.824	29.590	87,05	12,95
16 KAB. ENREKANG	103.297	15.650	86,84	13,16
17 KAB. LUWU	173.298	30.944	84,85	15,15
18 KAB. TANA TORAJA	215.348	56.830	79,12	20,88
19 KAB. LUWU UTARA	165.091	19.401	89,48	10,52
20 KAB. LUWU TIMUR	119.064	18.560	86,51	13,49
21 KOTA MAKASSAR	813.969	31.219	96,31	3,69
22 KOTA PARE-PARE	75.871	4.943	93,88	6,12
23 KOTA PALOPO	80.691	3.199	96,19	3,81
SULAWESI SELATAN	4.378.258	787.611	84,75	15,25
01 KAB. POLMAS	183.865	55.039	76,96	23,04
02 KAB. MAJENE	79.331	6.707	92,20	7,80
03 KAB. MAMUJU	151.412	25.218	85,72	14,28
04 KAB. MAMASA	62.275	13.818	81,84	18,16
05 KAB. MATRA	54.144	5.436	90,88	9,12
SULAWESI BARAT	531.027	106.218	83,33	16,67

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2005

Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk melihat masyarakat yang berusia produktif memiliki kemampuan membaca atau terbebas dari buta huruf, secara persentase dapat dilihat pada tabel 10. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2005 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan yang melek huruf adalah sebesar 84,75 persen (Melek huruf adalah mereka yang bisa membaca menulis huruf latin dan huruf lainnya). Sebaliknya, Angka Buta Huruf menunjukkan ketertinggalan sekelompok penduduk tertentu dalam mencapai pendidikan, dimana besarnya mencapai 15,25 persen dari penduduk 15 tahun keatas yang tidak mampu membaca dan menulis. Angka Buta Huruf ini juga merupakan cerminan besar kecilnya perhatian pemerintah, baik pusat maupun lokal terhadap pendidikan penduduknya.

Untuk Provinsi Sulawesi Barat yang melek huruf adalah sebesar 83,33 persen. Sebaliknya, Angka Buta Huruf berarti mencapai 16,67 persen dari penduduk 15 tahun keatas yang tidak mampu membaca dan menulis. Secara umum, penduduk yang terbebas dari buta huruf di kedua provinsi tersebut cukup tinggi, yaitu diatas 80 persen secara rata-rata. Persentase terendah adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 70,10 persen dan tertinggi Kota Makassar sebesar 96,31 persen. Untuk Provinsi Sulawesi Barat, penduduk yang melek huruf tertinggi adalah Kabupaten Majene mencapai 92,20 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Polewali Mandar (76,96 persen).

i. Rumah Tangga dengan Fasilitas Air Bersih

Ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum mutlak diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang sehat, rumah tangga dengan fasilitas air bersih adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas air, dimana air tersebut layak untuk diminum bagi seluruh anggota rumah tangga dan memenuhi standar kesehatan, sehingga perlu diketahui sumber airnya, yang termasuk fasilitas air minum adalah instalasi yang dikelola oleh PAM/PDAM atau non- PAM/PDAM, termasuk sumur dan pompa baik yang menggunakan penjernihan air ataupun tidak, bila tidak apakah sumber air bersih tersebut (sumur dan mata air) merupakan sumber air terlindung, dalam hal ini termasuk air dalam kemasan dan air isi ulang, secara persentase dapat dilihat pada tabel 11.

Secara umum, rumah tangga yang memiliki fasilitas air bersih di kedua provinsi tersebut relatif bervariasi, yaitu diatas 20 persen. Persentase terendah adalah Kabupaten Mamasa sebesar 20,72 persen dan tertinggi Kota Makassar sebesar 98,42 persen. Untuk Provinsi Sulawesi Barat, ketersediaan fasilitas air bersih tertinggi adalah Kabupaten Majene dan yang terendah adalah Kabupaten Mamasa.

Secara rata-rata, rumah tangga yang memiliki fasilitas air bersih di Sulawesi Selatan mencapai 70,58 persen dari rumah tangga yang ada, sedangkan untuk Sulawesi Barat mencapai 51,56.

Tabel 11.
Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Air Bersih
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Tahun 2005

KABUPATEN/KOTA	AIR	KABUPATEN/KOTA	AIR
(1)	(2)	(1)	(2)
01 KAB. SELAYAR	55,14	01 KAB. POLMAS	58,11
02 KAB. BULUKUMBA	66,19	02 KAB. MAJENE	61,00
03 KAB. BANTAENG	54,21	03 KAB. MAMUJU	51,23
04 KAB. JENEPONTO	73,72	04 KAB. MAMASA	20,72
05 KAB. TAKALAR	87,75	05 KAB. MATRA	55,78
06 KAB. GOWA	69,47		
07 KAB. SINJAI	51,27		
08 KAB. MAROS	53,96		
09 KAB. PANGKEP	74,47		
10 KAB. BARRU	78,31		
11 KAB. BONE	66,77		
12 KAB. SOPPENG	79,12		
13 KAB. WAJO	66,73		
14 KAB. SIDRAP	94,41		
15 KAB. PINRANG	78,82		
16 KAB. ENREKANG	26,53		
17 KAB. LUWU	57,14		
18 KAB. TANA TORAJA	37,34		
19 KAB. LUWU UTARA	58,68		
20 KAB. LUWU TIMUR	42,83		
21 KOTA MAKASSAR	98,43		
22 KOTA PARE-PARE	93,74		
23 KOTA PALOPO	83,03		
SULAWESI SELATAN	70,58	SULAWESI BARAT	51,56

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2005

Untuk Sulawesi Barat, fasilitas air bersih lebih sulit diperoleh, sehingga hampir setengah rumah tangga yang ada belum bisa menikmati fasilitas air bersih, hal ini dimungkinkan karena, rumah tangga yang tinggal di Sulawesi

Barat dominan berada di pesisir pantai dari Kabupaten Polewali Mandar sampai ke Mamuju Utara, sehingga sulit mendapatkan air tanah karena imbibisi air laut, sementara untuk Kabupaten Mamasa yang berada di pegunungan, akses air bersih agak kurang karena sumber air umumnya tidak terlindung, sehingga dianggap tidak memenuhi standar kesehatan air bersih.

j. Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Jamban Sendiri yang dilengkapi dengan Tangki Septik

Ketersediaan fasilitas tempat buang air besar tersendiri dengan tangki septik mutlak dalam menjaga lingkungan tetap sehat dan terbebas dari kemungkinan pencemaran limbah manusia, yang dimaksud dengan fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban/kakus/*Water Closed* yang dapat digunakan oleh rumah tangga, dimana penggunaannya hanya digunakan oleh rumah tangga yang bersangkutan saja dan dilengkapi dengan tempat pembuangan akhir berupa bak penampungan yang terbuat dari pasangan bata/batu atau beton, baik mempunyai bak resapan maupun tidak, secara persentase dapat dilihat variasinya pada tabel 12.

Secara umum, rumah tangga yang memiliki fasilitas jamban sehat di kedua provinsi tersebut relatif bervariasi, yaitu diatas 24 persen.

Persentase terendah adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 24,33 persen dan tertinggi Kabupaten Soppeng sebesar 81,99 persen. Untuk Provinsi Sulawesi Barat, ketersediaan fasilitas jamban tertinggi adalah

Kabupaten Mamuju Utara dan yang terendah adalah Kabupaten Polewali Mandar, hal ini dimungkinkan karena kesadaran untuk membuat jamban sendiri masih kurang, cenderung memilih pantai sebagai tempat pembuangan akhir.

Tabel 12.
Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Jamban Sendiri
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Tahun 2005

KABUPATEN/KOTA	JAMBAN	KABUPATEN/KOTA	JAMBAN
(1)	(2)	(1)	(2)
01 KAB. SELAYAR	29,71	01 KAB. POLMAS	32,28
02 KAB. BULUKUMBA	57,97	02 KAB. MAJENE	35,58
03 KAB. BANTAENG	42,50	03 KAB. MAMUJU	39,12
04 KAB. JENEPONTO	24,33	04 KAB. MAMASA	43,75
05 KAB. TAKALAR	47,34	05 KAB. MATRA	45,63
06 KAB. GOWA	63,91		
07 KAB. SINJAI	61,30		
08 KAB. MAROS	43,05		
09 KAB. PANGKEP	49,26		
10 KAB. BARRU	50,63		
11 KAB. BONE	50,40		
12 KAB. SOPPENG	82,00		
13 KAB. WAJO	67,19		
14 KAB. SIDRAP	70,88		
15 KAB. PINRANG	60,52		
16 KAB. ENREKANG	54,40		
17 KAB. LUWU	46,82		
18 KAB. TANA TORAJA	68,91		
19 KAB. LUWU UTARA	52,94		
20 KAB. LUWU TIMUR	62,37		
21 KOTA MAKASSAR	67,62		
22 KOTA PARE-PARE	68,23		
23 KOTA PALOPO	57,06		
SULAWESI SELATAN	57,57	SULAWESI BARAT	37,33

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2005

k. Rumah Tangga dengan Jarak Sumber Air ke Penampungan Akhir lebih dari 10 m.

Sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi kebersihan lingkungan dan sebaran kepadatan penduduk. Limbah manusia dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk dalam hal ini dapat mencemari sumber air yang digunakan oleh rumah tangga, sehingga mengurangi kadar kualitas standar kesehatan air untuk konsumsi anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan jarak penampungan akhir >10m adalah jarak penampungan pembuangan akhir dari jamban/kakus/*Water Closed* yang dapat digunakan oleh rumah tangga ke sumber air yang digunakan oleh rumah tangga.

Dari tabel 13 secara umum, rumah tangga yang jauh dari penampungan akhir adalah rendah di daerah yang padat, seperti di daerah kota. Persentase terendah adalah Kota Makassar sebesar 4,55 persen dan tertinggi Kabupaten Enrekang sebesar 46,60 persen. Untuk Provinsi Sulawesi Barat, rumah tangga yang jauh dari penampungan akhir tertinggi adalah Kabupaten Mamuju Utara (sebesar 45,47 persen) dan yang terendah adalah Kabupaten Majene (sebesar 14,36).

Hal tersebut dimungkinkan karena sangat sedikit rumah tangga di Majene yang menggunakan jamban dengan bak penampungan, umumnya memilih pantai sebagai tempat buang air besar. Secara rata-rata, rumah

tangga dengan jarak sumber air ke penampungan akhir yang jaraknya lebih dari 10 meter di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 28,71 persen dari total rumah tangga, sedangkan untuk Sulawesi Barat mencapai 31,42 persen

Tabel 13.
Persentase Rumah Tangga dengan Jarak Sumber Air
ke Penampungan Akhir lebih dari 10 m
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Tahun 2005

KABUPATEN/KOTA	JARAK	KABUPATEN/KOTA	JARAK
(1)	(2)	(1)	(2)
01 KAB. SELAYAR	27,66	01 KAB. POLMAS	25,44
02 KAB. BULUKUMBA	30,48	02 KAB. MAJENE	14,36
03 KAB. BANTAENG	18,90	03 KAB. MAMUJU	41,40
04 KAB. JENEPONTO	18,92	04 KAB. MAMASA	27,96
05 KAB. TAKALAR	34,24	05 KAB. MATRA	45,47
06 KAB. GOWA	41,40		
07 KAB. SINJAI	33,69		
08 KAB. MAROS	28,70		
09 KAB. PANGKEP	27,66		
10 KAB. BARRU	21,78		
11 KAB. BONE	32,76		
12 KAB. SOPPENG	30,59		
13 KAB. WAJO	44,28		
14 KAB. SIDRAP	31,73		
15 KAB. PINRANG	35,82		
16 KAB. ENREKANG	46,60		
17 KAB. LUWU	40,14		
18 KAB. TANA TORAJA	46,04		
19 KAB. LUWU UTARA	32,27		
20 KAB. LUWU TIMUR	36,74		
21 KOTA MAKASSAR	4,55		
22 KOTA PARE-PARE	15,97		
23 KOTA PALOPO	8,87		
SULAWESI SELATAN	28,71	SULAWESI BARAT	31,42

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2005

C Kualitas Sumberdaya Manusia

Perbandingan kondisi kualitas SDM di Provinsi Sulawesi Barat dari indikator rasio ketidaktergantungan menunjukkan dari 100 penduduk usia produktif menanggung 60 penduduk yang belum produktif dan 6 penduduk yang dianggap tidak produktif lagi, dari indikator tenaga kerja yang bekerja diluar sektor pertanian baru mencapai 27,37 persen pekerja, dari indikator angka lahir hidup rata-rata menunjukkan 3 anak yang dilahirkan hidup, dari indikator kesakitan menunjukkan 27,37 persen penduduk pernah mengalami sakit, dari indikator balita dengan imunisasi lengkap baru mencapai 16,85 persen balita, dari indikator APK SLTP menunjukkan 62,74 persen penduduk berusia 13-15 tertampung di bangku SLTP, dari indikator penduduk yang berijasah minimal SLTP menunjukkan 30,43 persen penduduk 15 tahun keatas minimal telah berijasah SLTP, dari indikator angka melek huruf menunjukkan 83,33 persen penduduk 15 tahun keatas telah bebas buta huruf, dari indikator kepemilikan fasilitas air bersih mencapai 51,56 persen rumah tangga, dari indikator kepemilikan fasilitas jamban tersendiri baru mencapai 37,33 persen rumah tangga, sedangkan dari indikator jarak sumber air ke penampungan akhir diatas 10 meter mencapai 31,42 persen rumah tangga. Sehingga kondisi kualitas SDM ditinjau dari indikator kesejahteraan rakyat secara umum masih kurang baik, kecuali indikator pendidikan yang relatif lebih baik.

Sedangkan kondisi kualitas SDM Sulawesi Selatan dari indikator rasio ketidaktergantungan menunjukkan dari 100 penduduk usia produktif menanggung 49 penduduk yang belum produktif dan 8 penduduk yang dianggap tidak produktif lagi, dari indikator tenaga kerja yang bekerja diluar sektor pertanian telah mencapai 51,5 persen pekerja, dari indikator angka lahir hidup rata-rata menunjukkan 3 anak yang dilahirkan hidup, dari indikator kesakitan menunjukkan 15,30 persen penduduk pernah mengalami sakit, dari indikator balita dengan imunisasi lengkap mencapai 31,58 persen balita, dari indikator APK SLTP menunjukkan 71,01 persen penduduk berusia 13-15 telah tertampung di bangku SLTP, dari indikator penduduk yang berijazah minimal SLTP menunjukkan 43,64 persen penduduk 15 tahun keatas minimal telah berijazah SLTP, dari indikator angka melek huruf menunjukkan 84,75 persen penduduk 15 tahun keatas terbebas buta huruf, dari indikator kepemilikan fasilitas air bersih mencapai 70,58 persen rumah tangga, dari indikator kepemilikan fasilitas jamban tersendiri telah mencapai 57,57 persen rumah tangga, sedangkan dari indikator jarak sumber air ke penampungan akhir diatas 10 meter mencapai 28,71 persen rumah tangga. Sehingga kondisi kualitas SDM ditinjau dari indikator kesejahteraan rakyat secara umum relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi kualitas SDM Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat tahun 2005 (tabel 14).

Tabel 14.
Persentase Indikator Kesejahteraan Rakyat
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2005

KABUPATEN/KOTA	RKT	NON TANI	ALH	SAKIT	IMUN	APK SLTP	MIN SLTP	AMH	AIR	JAMB AN	JARAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01 KAB. SELAYAR	37,46	43,76	2,90	14,49	7,83	70,01	32,76	85,99	55,14	29,71	27,66
02 KAB. BULUKUMBA	52,32	58,14	2,91	13,99	8,01	81,89	46,81	84,64	66,19	57,97	30,48
03 KAB. BANTAENG	44,91	35,73	3,27	20,85	28,14	49,47	30,77	73,58	54,21	42,50	18,90
04 KAB. JENEPONTO	43,59	47,19	3,61	22,84	20,52	54,28	30,57	70,10	73,72	24,33	18,92
05 KAB. TAKALAR	44,00	50,83	3,10	17,67	10,61	63,61	35,69	77,14	87,75	47,34	34,24
06 KAB. GOWA	41,66	60,95	2,93	14,21	27,71	68,11	39,43	78,28	69,47	63,91	41,40
07 KAB. SINJAI	39,93	33,73	3,62	18,51	26,27	73,40	31,09	81,18	51,27	61,30	33,69
08 KAB. MAROS	39,76	54,82	3,59	10,38	20,44	71,81	35,71	78,44	53,96	43,05	28,70
09 KAB. PANGKEP	38,93	52,52	3,41	11,85	26,08	58,19	33,80	84,09	74,47	49,26	27,66
10 KAB. BARRU	44,27	60,04	3,61	19,76	30,81	82,81	35,31	84,89	78,31	50,63	21,78
11 KAB. BONE	46,28	39,07	3,20	14,11	26,41	57,26	34,34	84,91	66,77	50,40	32,76
12 KAB. SOPPENG	50,31	36,61	2,58	7,46	22,29	73,59	40,33	85,02	79,12	82,00	30,59
13 KAB. WAJO	49,31	42,15	3,02	13,73	20,37	39,42	23,41	79,85	66,73	67,19	44,28
14 KAB. SIDRAP	46,87	48,59	3,09	10,39	51,09	72,34	36,81	82,75	94,41	70,88	31,73
15 KAB. PINRANG	39,85	37,19	3,50	14,00	27,68	66,15	37,69	87,05	78,82	60,52	35,82
16 KAB. ENREKANG	28,61	26,68	3,97	14,58	43,05	80,70	50,94	86,84	26,53	54,40	46,60
17 KAB. LUWU	34,76	24,55	3,81	16,36	37,48	81,26	43,46	84,85	57,14	46,82	40,14
18 KAB. TANA TORAJA	26,37	16,25	3,95	5,26	36,87	90,66	47,35	79,12	37,34	68,91	46,04
19 KAB. LUWU UTARA	31,10	29,91	3,69	26,50	40,57	67,53	39,64	89,48	58,68	52,94	32,27
20 KAB. LUWU TIMUR	41,50	38,98	3,14	21,70	44,47	81,46	38,28	86,51	42,83	62,37	36,74
21 KOTA MAKASSAR	51,79	97,66	3,15	17,08	43,06	81,87	70,82	96,31	98,43	67,62	4,55
22 KOTA PARE-PARE	48,01	93,45	3,23	13,77	51,36	96,61	64,62	93,88	93,74	68,23	15,97
23 KOTA PALOPO	38,12	70,15	3,44	20,05	67,94	80,21	63,07	96,19	83,03	57,06	8,87
SULAWESI SELATAN	43,46	51,50	3,29	15,30	31,58	71,01	43,64	84,75	70,58	57,57	28,71
01 KAB. POLMAS	36,57	32,54	3,54	19,54	22,55	54,53	24,84	76,96	58,11	32,28	25,44
02 KAB. MAJENE	37,03	47,64	3,41	11,30	12,76	72,60	44,76	92,20	61,00	35,58	14,36
03 KAB. MAMUJU	31,72	21,86	3,13	26,29	12,31	63,08	30,43	85,72	51,23	39,12	41,40
04 KAB. MAMASA	26,58	13,64	3,33	19,85	25,72	77,99	31,38	81,84	20,72	43,75	27,96
05 KAB. MATRA	35,05	14,76	2,67	35,50	7,91	60,42	30,88	90,88	55,78	45,63	45,47
SULAWESI BARAT	33,96	27,37	3,30	27,37	16,85	62,74	30,43	83,33	51,56	37,33	31,42

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2005

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Dalam kaitannya secara langsung dengan penduduk usia produktif setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yaitu: Pertama adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja di luar sektor pertanian dan penduduk usia kerja. Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 5.165.869 orang, sementara jumlah kesempatan kerja diluar sektor pertanian yang ada hanya sekitar 1.435.632 orang (27,79 persen, lihat lampiran1), sedangkan jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 637.245 orang, sementara jumlah kesempatan kerja diluar sektor pertanian yang ada hanya sekitar 106.328 orang (16,69 persen). Kedua, tingkat pendidikan penduduk usia kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan penduduk usia kerja di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi pendidikan SLTA yaitu sekitar 20,16 persen, sedangkan struktur pendidikan penduduk usia kerja di Provinsi Sulawesi Barat didominasi pendidikan SLTP yaitu sekitar 15,17 persen.

Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja terutama di luar sektor pertanian dan rendahnya kualitas penduduk usia produktif secara regional di berbagai sektor ekonomi. Lesunya

dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama di luar sektor pertanian.

Masalah SDM inilah yang dikhawatirkan menjadi sebab proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas penduduk usia kerja yang memadai (etos kerja yang rendah) atau kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Sekarang bukan saatnya membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Tapi sudah seharusnya secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumberdaya daya yang dimiliki (resources base) dengan kemampuan SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian regional dan nasional. Apalagi kondisi perekonomian abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadi persaingan antar negara.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan link and match mendapat tempat sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembahasan dan analisis tentang kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan indikator kesejahteraan rakyat tahun 2005 memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi kualitas SDM Sulawesi Barat dilihat dari nilai indikator rasio ketidaktergantungan, indikator tenaga kerja yang bekerja diluar sektor pertanian, indikator angka lahir hidup , indikator kesakitan , indikator balita dengan imunisasi lengkap, indikator APK SLTP, indikator penduduk yang berijazah minimal SLTP , indikator angka melek huruf , indikator kepemilikan fasilitas air bersih, indikator kepemilikan fasilitas jamban tersendiri, dan dari nilai indikator jarak sumber air ke penampungan akhir diatas 10 meter secara umum masih kurang baik, kecuali indikator pendidikan yang relatif lebih baik. Sedangkan kondisi kualitas SDM Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari nilai indikator kesejahteraan rakyat tahun 2005 secara umum relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Kualitas SDM Provinsi Sulawesi Barat.

2. Dalam kaitannya secara langsung dengan penduduk usia produktif setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dimana ada ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja di luar sektor pertanian dan penduduk usia kerja, serta tingkat pendidikan penduduk usia kerja yang ada masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja terutama di luar sektor pertanian dan rendahnya kualitas penduduk usia produktif. Masalah SDM ini dikhawatirkan menjadi sebab kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM.

B. Saran

Dengan melihat hasil pembahasan dan kesimpulan ada beberapa saran yang akan disampaikan :

1. Diperlukan kebijakan pembangunan pada semua sektor di Provinsi Sulawesi Barat, penciptaan keseimbangan yang layak antara pendapatan daerah pedesaan dengan perkotaan harus segera diupayakan dengan orientasi kegiatan ekonomi serta investasi sosial perlu ditujukan di pedesaan secara integratif. Untuk itu perlu diupayakan program pembangunan oleh pemerintah setempat yang meliputi : Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan

kebutuhan pembangunan di berbagai sektor, dalam rangka meningkatkan etos kerja; Program Lingkungan Sehat, dengan mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat agar masyarakat terbebas dari masalah kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Menerapkan ide link and match yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan yang ditunjang oleh kualitas kurikulum sekolah dan perguruan tinggi yang lebih memadai untuk menciptakan lulusan yang siap pakai. Dan yang lebih penting dalam hal ini adalah strategi pembangunan dan industrialisasi secara makro yang seharusnya berbasis sumberdaya alam (SDA) yang dimiliki (local genuine).

2. Penduduk dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam pembangunan, oleh karena dalam proses membangun, masyarakat juga perlu meningkatkan kualitasnya secara aktif, baik ditinjau dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketenagakerjaan maupun pengembangan teknologi dalam berbagai kesempatan.
3. Penelitian ini dirasakan masih belum komprehensif, sehingga perlu dikembangkan dengan melihat faktor lain yang mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia di Sulawesi Barat maupun Sulawesi Selatan, demikian juga dengan keterbatasan metodologi penelitian

yang digunakan, masih perlu diujicoba dengan menggunakan metodologi yang berbeda pada penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kadrie, Muchdie, Suhandoyo (Editor), 1999, **Tiga Pilar Pengembangan Wilayah: Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Teknologi**, Direktorat Kebijakan Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah – BPPT.
- Anwar Zs., Johny, 12 Desember 2006, **Tantangan Pimpinan Daerah dan Masyarakat Sulawesi Barat ke Depan**, *Radar Sulbar*, hlm.5.
- Ananta, Aris dan Sri Harijanti Hatmadji, 1985, **Mutu Modal Manusia**, LD-FE Universitas Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 1999, **Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Rakyat**, Jakarta.
- Elfindri, 2001, **Ekonomi Sumberdaya Manusia**, Universitas Andalas, Padang.
- Esmara, Hendra, 1987, **Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan**, PT. Gramedia, Jakarta
- Fajri, Papan A., 2000, **Analisis Kualitas SDM menurut Kota di Indonesia**, LD-FE UI, Jakarta
- Kartadinata, Sunaryo. 1997. **Pendidikan dan Pengembangan SDM Bermutu Memasuki Abad XXI**. Purwokerto: Makalah Konvensi.
- Lains, Alfians, 1987, **Peranan Kualitas Penduduk dalam Pembangunan di Indonesia**, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Forum Ekonomi Isei, Jakarta
- Michael P. Todaro, Stephen C.Smith. 2004. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, edisi kedelapan,Erlangga, Jakarta.
- Moviyanti, 2003, **Analisis Kualitas SDM di Propinsi Lampung Tahun 2003**, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.

- Munandar, A.S., 1981, ***Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Pembangunan Nasional***, Balai Pustaka, Jakarta.
- Panjaitan, Dra. O.E., 1994, ***Kreativitas dan Sumberdaya Manusia***, Yayasan Sumber Agung, Jakarta.
- Roestam, Soepardjo, 1993, ***Pembangunan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat***, Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- Sasmito, Puspo, 2001, ***Analisis Kualitas SDM untuk Menentukan Kesiapan Propinsi Jawa Tengah dalam Otonomi Daerah***, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- Soepardi, Jane, dr., 19 April 2006, ***Kualitas SDM, Kendala Program Imunisasi Rutin***, *Suara Pembaharuan*, hlm.6.
- Sukarno, Suyoso, 2002, ***Pembinaan Tenaga Manusia***, Wacana Ilmu dan Pemikiran, Jakarta.
- Syarif, Muhammad, 1993, ***Dampak Mutu Modal Manusia dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia***, LD-FE UI, Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1989, ***Untaian Pengembangan Sumberdaya Manusia***, LD-FE UI, Jakarta.
- Wahjoetomo, 1993, ***Wajib Belajar Sembilan Tahun : Problematika dan Alternatif Solusinya***, PT. Gramedia, Jakarta .
- Djaafar, Zahara, Dra. Hj. Tengku, 2001, ***Pendidikan Non Formal dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dalam Pembangunan***, Universitas Negeri Padang.

Lampiran 1. Penduduk yang Bekerja di Luar Sektor Pertanian Tahun 2005

Tabel 15.
Peduduk 15 tahun ke atas yang Bekerja di Luar Sektor Pertanian
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Tahun 2005

KABUPATEN/KOTA	INDUSTRI	KONS- TRUKSI	PERDAGA NGAN	TRANS PORTASI	LAINNYA	JASA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 KAB. SELAYAR	2.396	1.388	5.712	1.772	2.424	5.424	19.116
02 KAB. BULUKUMBA	9.554	4.425	24.460	6.386	10.232	22.699	77.756
03 KAB. BANTAENG	2.654	1.352	6.189	4.294	5.514	7.487	27.490
04 KAB. JENEPONTO	3.524	2.584	13.152	22.234	6.348	8.204	56.046
05 KAB. TAKALAR	6.954	5.506	13.936	6.153	5.707	10.239	48.495
06 KAB. GOWA	18.948	19.602	38.037	16.110	13.131	25.167	130.995
07 KAB. SINJAI	997	772	12.816	3.344	4.705	7.357	29.991
08 KAB. MAROS	10.056	5.576	17.777	5.430	4.958	11.781	55.578
09 KAB. PANGKEP	5.139	2.115	14.004	6.741	10.323	15.795	54.117
10 KAB. BARRU	3.164	1.980	10.679	4.298	5.286	11.290	36.697
11 KAB. BONE	16.308	444	35.844	12.666	14.190	28.284	107.736
12 KAB. SOPPENG	1.562	937	10.318	3.409	6.209	12.095	34.530
13 KAB. WAJO	19.462	1.275	19.256	3.962	5.672	13.197	62.824
14 KAB. SIDRAP	6.264	2.175	14.181	4.350	6.873	9.483	43.326
15 KAB. PINRANG	2.145	2.275	13.998	4.051	10.075	13.133	45.677
16 KAB. ENREKANG	1.326	575	7.835	2.565	3.330	6.525	22.156
17 KAB. LUWU	4.338	624	7.854	4.026	4.974	6.536	28.352
18 KAB. TANA TORAJA	3.596	628	4.038	2.526	5.148	7.412	23.348
19 KAB. LUWU UTARA	2.090	1.731	14.760	2.306	3.425	8.665	32.977
20 KAB. LUWU TIMUR	3.036	2.620	8.724	1.392	7.832	4.108	27.712
21 KOTA MAKASSAR	42.179	33.085	149.762	40.598	40.892	99.629	406.145
22 KOTA PARE-PARE	1.903	1.837	12.864	3.652	3.797	11.733	35.786
23 KOTA PALOPO	1.932	941	8.391	4.018	2.950	10.550	28.782
SULAWESI SELATAN	169.527	94.447	464.587	166.283	183.995	356.793	1.435.632
01 KAB. POLMAS	13.132	1.673	16.085	3.626	5.725	10.643	50.884
02 KAB. MAJENE	2.433	615	5.098	3.153	2.211	7.021	20.531
03 KAB. MAMUJU	2.001	1.222	6.932	2.613	3.570	6.852	23.190
04 KAB. MAMASA	329	235	893	141	1.222	3.431	6.251
05 KAB. MATRA	468	540	2.052	396	1.044	972	5.472
SULAWESI BARAT	18.363	4.285	31.060	9.929	13.772	28.919	106.328

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2005

Lampiran 2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tabel 16
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SLTP ke atas
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Tahun 2005

KABUPATEN/KOTA	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 KAB. SELAYAR	11.208	10.680	3.320	25.208
02 KAB. BULUKUMBA	48.244	62.096	20.637	130.977
03 KAB. BANTAENG	14.419	16.350	4.877	35.646
04 KAB. JENEPONTO	37.836	26.190	5.624	69.650
05 KAB. TAKALAR	30.873	25.066	5.789	61.728
06 KAB. GOWA	63.288	71.529	19.491	154.308
07 KAB. SINJAI	23.439	16.827	6.129	46.395
08 KAB. MAROS	25.574	35.346	9.144	70.064
09 KAB. PANGKEP	24.471	27.495	11.295	63.261
10 KAB. BARRU	18.260	17.378	4.119	39.757
11 KAB. BONE	74.244	71.682	21.258	167.184
12 KAB. SOPPENG	32.224	27.585	9.135	68.944
13 KAB. WAJO	31.048	25.366	5.678	62.092
14 KAB. SIDRAP	32.451	27.492	5.220	65.163
15 KAB. PINRANG	43.443	33.939	8.701	86.083
16 KAB. ENREKANG	24.986	28.611	6.989	60.586
17 KAB. LUWU	44.312	39.778	4.664	88.754
18 KAB. TANA TORAJA	67.460	53.840	7.564	128.864
19 KAB. LUWU UTARA	37.697	29.547	5.884	73.128
20 KAB. LUWU TIMUR	27.640	21.008	4.028	52.676
21 KOTA MAKASSAR	159.769	322.348	116.432	598.549
22 KOTA PARE-PARE	18.807	26.004	7.414	52.225
23 KOTA PALOPO	19.103	25.516	8.287	52.906
SULAWESI SELATAN	910.796	1.041.673	301.679	2.254.148
01 KAB. POLMAS	29.104	23.498	6.743	59.345
02 KAB. MAJENE	16.497	17.218	4.798	38.513
03 KAB. MAMUJU	27.751	22.528	3.477	53.756
04 KAB. MAMASA	13.536	8.883	1.457	23.876
05 KAB. MATRA	9.792	7.668	936	18.396
SULAWESI BARAT	96.680	79.795	17.411	193.886

Sumber : Hasil Pengolahan Data Susenas 2005

PROGRAM STUDI : PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



Nama Lengkap (titel S1) : MARTIN WIBISONO, S.ST.

Nomor Pokok : P03 06 204 507

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl. Lahir : Surakarta / 18 Februari 1977

Agama : Islam

Suku/Bangsa : Jawa / Indonesia

Alamat Rumah : BTN AXURI Blok A.11 - Mamuju

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat Kantor : Jl. K.H. Ahad No. 4 – Mamuju, 91511

Program Studi : Pengelolaan Lingkungan Hidup

Konsentrasi : Studi Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya
Manusia (SDM)

Tanggal Lulus : 9 Mei 2007

Nomor Alumni :

IPK :

Predikat Kelulusan :

Judul Tesis : Analisis Indikator Kualitas Sumberdaya Manusia di Provinsi
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2005

Pembimbing : 1. **Prof. Dr. Sulaiman Asang, MA** (Ketua)
2. **Dr. H. Madris, DPS, M.Si** (Anggota)